



RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA-P) TAHUN 2021

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun **2021**, sebagai salah satu bagian dari substansi perencanaan dan sinkronisasi perencanaan strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD sampai dengan akhir tahun anggaran tahun 2021. Perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran 2021 yang sedang berjalan menuntut beberapa penyesuaian selain upaya agar anggaran yang dialokasikan dapat mencapai target kinerja pemerintah daerah yang telah ditetapkan juga terjadinya wabah pandemi Covid-19 khususnya di Provinsi Banten menuntut adanya penyesuaian dan langkah-langkah antisipatif serta upaya penanggulangannya yang berdampak juga pada penyesuaian dan atau pergeseran anggaran serta perubahan anggaran pada Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi Banten tahun 2021.

Upaya penyesuaian APBD dengan perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran 2021 tersebut diawali dengan tahapan Refocusing/pergeseran anggaran sebelum perubahan anggaran Tahun 2021 serta penyusunan RKPD-P tahun anggaran 2021 yang selanjutnya akan dijadikan bahan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS perubahan tahun anggaran 2021.

Harapan kami semoga Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2021 ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Serang, September 2021
Plt.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten



Wawan Gunawan, S.Sos, M.Si
NIP : 19671217 198803 1006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB. II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DLHK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK	7
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK tahun lalu	8
2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK Semester I Tahun 2021	70
BAB. III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN	97
BAB. IV P E N U T U P	126

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah DLHK TA 2020	9
Tabel 2.2. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2020	9
Tabel 2.3. Realisasi Anggaran, Indikator Kinerja Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2020	12
Tabel 2.4. Indikator Kinerja Sasaran dan Capaian Realisasi Kinerja Sasaran DLHK Tahun 2020	25
Tabel 2.5. Luas Hutan Negara di Provinsi Banten	27
Tabel 2.6. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program DLHK Provinsi Banten Tahun 2020	29
Tabel 2.7. Jumlah Kelompok/Lembaga dalam Pelaksanaan Indikator peran serta masyarakat dalam perlindungan pengelolaan Lingkungan hidup	37
Tabel 2.8. Realisasi Pendapatan DLHK Provinsi Banten Triwulan II /Semester 1 Tahun 2021	71
Tabel 2.9. Capaian Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan DLHK Sampai dengan Triwulan II/Juni Tahun 2021	72
Tabel 2.10. Pengukuran Evaluasi Kinerja DLHK Semester I Tahun 2021	81
Tabel 3.1. Rencana Target Pendapatan DLHK ProvBanten Perubahan Anggaran 2021 .	98
Tabel 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Belanja pada Perubahan Renja OPD Tahun 2021 DLHK Prov Banten	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya penyesuaian APBD dengan perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran 2021 diawali dengan pergeseran anggaran/Refocusing Anggaran sebelum perubahan anggaran Tahun 2021 yang disebabkan beberapa hal antara lain adanya wabah pandemi Covid-19 khususnya di Provinsi Banten yang menuntut adanya penyesuaian dan Langkah Langkah antisipatif serta upaya penanggulangan bencana wabah pandemi covid 19 yang berdampak pada penyesuaian dan atau pergeseran anggaran serta perubahan anggaran pada beberapa OPD termasuk OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi Banten

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 termasuk perubahannya, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagaimana dimaksud pada peraturan tersebut dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD.

Proses Perubahan Renja DLHK Tahun 2021 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja OPD) Tahun 2021, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra), Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai

dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan Misi dan Visi yang telah ditetapkan.

Perubahan Renja memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, Perubahan Renja dilakukan untuk menyesuaikan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk tahun 2017-2022. Selanjutnya Perubahan Renja DLHK ini dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD perubahan dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2021 Provinsi Banten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pembuatan Rencana Kerja Perubahan (Renja-Perubahan) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
13. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021.
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten;

20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten 2017-2022;
24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 ini adalah sebagai bahan masukan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021, Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 didasarkan pada adanya kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan dan Hasil evaluasi kinerja program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 selain itu untuk mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran 2021 yang sedang berjalan terutama terkait adanya bencana pandemic covid 19 di Provinsi Banten serta upaya pemulihan ekonomi akibat pandemic covid 19, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian anggaran untuk dapat mencapai target kinerja pemerintah daerah yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah Tersedianya pedoman dan arahan bagi unit kerja (Sekretariat, Bidang, CDLHK dan UPT) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjawab berbagai tuntutan dan kebutuhan yang akan dihadapi di tahun berjalan dimana memuat kegiatan lanjutan

tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Selain itu juga untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, dengan :

- a. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- c. mengarahkan proses Rencana Kegiatan dan Anggaran;
- d. mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
- e. mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;
- f. menjadikan acuan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) OPD;
- g. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-OPD) Perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
- h. Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DLHK PROVINSI BANTEN TAHUN 2020
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB. III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DLHK
PROVINSI BANTEN TA 2021

BAB. IV P E N U T U P

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD (DLHK)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang selanjutnya disebut DLHK Provinsi Banten merupakan Dinas Teknis Provinsi sebagai unsur penunjang pemerintah provinsi dalam penanganan masalah Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DLHK Provinsi Banten merupakan gabungan 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dishutbun) dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLHK tahun sebelumnya (TA.2020) sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dan pencapaian kinerja Renstra DLHK ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra DLHK, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) pada Tahun Lalu (T.A. 2020)

A. Rekapitulasi Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2020

Target Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum Perubahan Anggaran (APBD Murni TA 2020) adalah sebesar Rp. 165.360.000,- (Seratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah jasa pengujian laboratorium Lingkungan target sebesar Rp.156.000.000,- (Seratus lima puluh enam juta rupiah) dan Retribusi Ruangan (kantin) terget sebesar Rp. 9.360.000,- (Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), Target Pendapatan pada Perubahan Anggaran Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 69.360.000,- (Enam puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah jasa pengujian laboratorium Lingkungan tergetnya menjadi sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan Retribusi Ruangan (kantin) tergetnya tetap sebesar Rp. 9.360.000,- (Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah tercapai bahkan secara umum melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 78.961.000,- (Tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) atau 113,8%. Terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah jasa pengujian laboratorium Lingkungan realisasi sebesar Rp. 71.041.000,- atau sebesar 118,4% dan Ruangan (kantin) realisasi sebesar Rp. 7.920.000,- atau 84,6%. Realisasi pendapatan Ruangan (Kantin) tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan dikarenakan pendapatan kantin menurun atau terdampak Pandemi Covid 19.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran pendapatan tahun anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten TA 2020

No	Kode rek	Uraian Pendapatan	Target APBD Murni (Rp)	Target APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		Lebih/(kurang) (Rp)	Ket
					(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4 12 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 165.360.000,00	Rp 69.360.000,00	Rp 78.961.000,00	113,8%	Rp 9.601.000,00	
1	4 12 15 02	Laboratorium	Rp 156.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 71.041.000,00	118,4%	Rp 11.041.000,00	
2	4 12 15 03	Ruangan	Rp 9.360.000,00	Rp 9.360.000,00	Rp 7.920.000,00	84,6%	Rp 1.440.000,00	

Pada Tahun 2020 Dukungan anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020 Sebelum Perubahan (APBD Murni) adalah sebesar Rp. 69.755.865.000,- (Enam puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan Rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 39.900.000.000,- (Tiga puluh sembilan milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 29.855.865.000,- (Dua puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 5 Program dan 34 Kegiatan.

Dalam APBD Perubahan TA 2020 terjadi Perubahan Pagu Anggaran menjadi sebesar Rp. 49.093.844.000,- (Empat puluh sembilan milyar sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung menjadi Rp. 28.068.000.000,- (Dua puluh delapan milyar enam puluh delapan juta rupiah) dan Belanja Langsung Rp. 21.025.844.000,- (Dua puluh satu milyar dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah Program yang dilaksanakan sebanyak 5 Program dan 31 Kegiatan.

Adapun jumlah realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menurut jenis Belanja sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 48.173.224.882,- (98,12%) dengan realisasi fisik sebesar 100,00% terdiri dari

Belanja Tidak Langsung dengan pagu sebesar Rp. 28.068.000.000,- realisasi sebesar Rp. 27.564.881.315,- (98,21%) realisasi fisik 100% dan Belanja Langsung dengan pagu sebesar Rp. 21.025.844.000,- realisasi sebesar Rp. 20.608.343.567,- (98,01%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Tabel 2.2. Realisasi keuangan Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

No	Uraian (Prog/Keg)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA DAERAH					
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	28.068.000.000	27.564.881.315	98,21	100	503.118.685
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	10.251.650.000	10.005.081.154	97,59	100	246.568.846
2	Tambahan Penghasilan PNS	17.816.350.000	17.559.800.161	98,56	100	256.549.839
II	BELANJA LANGSUNG	21.025.844.000	20.608.343.567	98,01	100	417.500.433
I	PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	12.422.136.000	12.179.069.036	98,04	100	243.066.964
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	24.790.000	24.790.000	100	100	0
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	311.190.000	306.254.900	98,41	100	4.935.100
3	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana	8.290.063.500,00	8.167.300.084	98,52	100	122.763.416
4	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan	870.882.496,00	862.758.390	99,07	100	8.124.106
5	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon	786.545.004	756.181.025	96,14	100	30.363.979
6	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	572.880.000,00	543.037.989	94,79	100	29.842.011
7	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten	869.910.000,00	849.107.800	97,61	100	20.802.200
8	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD pada CDLHK LT	689.275.000	663.038.848	96,19	100	26.236.152
9	Peningkatan Kapasitas Aparatur	6.600.000	6.600.000	100	100	0
10	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	0	0	0	0	0
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	1.886.709.500	1.853.177.651	98,22	100	33.531.849
11	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	285.410.000	283.556.000	99,35	100	1.854.000

12	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1.098.697.000	1.069.828.119	97,37	100	28.868.881
13	Pemeliharaan Lingkungan Hidup	225.795.000	224.455.080,00	99,41	100	1.339.920
14	Penguatan Early Warning System untuk Bencana Lingkungan Hidup (DAK)	0	0	0,00	0	0
15	Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	137.887.500	137.386.452,00	99,64	100	501.048
16	Pengujian dan Analisa Laboratorium Lingkungan	138.920.000	137.952.000	99,30	100	968.000
III	PROGRAM PENATAAN PENEGAKAN HUKUM dan PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	553.829.000	536.869.100	96,94	100	16.959.900
17	Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	155.400.000	150.645.000	96,94	100	4.755.000
18	Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum	135.419.000	123.359.000	91,09	100	12.060.000
19	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	263.010.000	262.865.100	99,94	100	144.900
IV	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	1.068.960.000	1.049.606.743	98,19	100	19.353.257
20	Pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan	393.540.000	392.020.000	99,61	100	1.520.000
21	Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan	321.590.000	315.156.400	98,00	100	6.433.600
22	Perencanaan dan Penatagunaan Hutan	282.220.000,00	271.215.343	96,10	100	11.004.657
23	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	48.200.000	47.905.000	99,39	100	295.000
24	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	23.410.000	23.310.000	99,57	95,83	100.000
V	PROGRAM PENGENDALIAN DAS dan KONSERVASI HUTAN	5.094.209.500	4.989.621.037	97,95	100	104.588.463
25	Pengelolaan DAS	520.079.000	504.159.080	97	100	15.919.920
26	Penyuluhan Kehutanan	266.670.000	265.268.000	99	100	1.402.000
27	Konservasi SDA dan Ekosistem	401.747.000	394.452.150	98	100	7.294.850
28	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif dan Sipil Teknis Diluar Kawasan Hutan (DAK)	0	0	0	0	0
29	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	720.854.000	716.302.000	99	100	4.552.000
30	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	1.045.468.000	1.040.555.540	100	100	4.912.460
31	Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten	375.579.000	372.714.000	99	100	2.865.000

32	Pengembangan dan Pemanfaatan Tahura Banten	701.938.000	646.129.300	92	100	55.808.700
33	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	887.413.500	881.010.967	99	100	6.402.533
34	Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan	174.461.000	169.030.000	97	100	5.431.000
	JUMLAH BELANJA DAERAH (BTL+BL)	49.093.844.000	48.173.224.882	98,12	100	920.619.118

Tabel. 2.3 Realisasi Anggaran dan indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2020

No	Jenis Belanja/Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan	Target Kinerja APBD Murni	Pagu Anggaran APBD MURNI (Rp)	Target Kinerja APBD Perubahan	Pagu Anggaran APBD Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran		Jumlah Silpa (Rp)	*Keterangan Silpa
							Rp	%			Anggaran Tidak Digunakan (Rp)	Sisa Kontrak (Rp)		
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG			39.900.000.000		28.068.000.000	27.564.881.315	98,21		100	503.118.685	-	503.118.685	Sisa anggaran dari gaji pokok , tunjangan dan tambahan penghasilan PNS
1	BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)		12 Bulan	11.695.226.000	12 Bulan	10.251.650.000	10.005.081.154	97,59	12 Bulan	100	246.568.846		246.568.846	
2	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS		12 Bulan	28.204.774.000	12 Bulan	17.816.350.000	17.559.800.161	98,56	12 Bulan	100	256.549.839		256.549.839	
II	BELANJA LANGSUNG			29.855.865.000		21.025.844.000	20.608.343.567	98,01			323.531.456	93.968.977	417.500.433	
A	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
		Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) (Nilai)	80,00 Nilai		80,00 Nilai									
1	Program Tata Kelola Pemerintahan			15.941.500.000		12.422.136.000	12.179.069.036	98,04		100	190.155.437	52.911.527	243.066.964	
		1 : Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	100%		100%				100%	100%				
		2 : Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%)	100%		100%				100%	100%				
		3 : Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)	100%		100%				100%	100%				
		4 : Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	100%		100%				100%	100%				
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset			64.000.000		24.790.000	24.790.000	100		100	0	0	0	
		Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	8 dokumen	35.482.000	8 Dokumen	19.062.000	19.062.000	100	8 Dokumen	100	-	-	-	
		Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 dokumen	14.526.000	-	2.356.000	2.356.000	100	2 dokumen	100	-	-	-	
		Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3 dokumen	13.992.000	2 Dokumen	3.372.000	3.372.000	100	2 Dokumen	100	-	-	-	

2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		500.000.000		311.190.000	306.254.900	98,41		100	3.305.100	1.630.000	4.935.100	
	Penyusunan laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	3 dokumen	15.150.000	3 Dokumen	14.100.000	14.100.000	100,00	3 Dokumen	100	-		-	
	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	10 dokumen	167.800.000	10 Dokumen	97.000.000	96.556.900	99,54	10 Dokumen	100	443.100		443.100	sisa belanja pengadaan dan perjalanan dinas dalam daerah
	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4 dokumen	87.090.000	4 Dokumen	25.380.000	24.380.000	96,06	4 Dokumen	100	1.000.000		1.000.000	sisa belanja pengadaan
	Penyediaan data dan informasi Pembangunan	5 dokumen	229.960.000	5 Dokumen	174.710.000	171.218.000	98,00	5 Dokumen	100	1.862.000	1.630.000	3.492.000	Rp 1.630.000 sisa kontrak belanja jasa konsultansi manajemen pengelolaan website dan penyusunan data statistik sektoral dan informasi geospasial tematik bidang LHK tahun 2020, dan sisa kontrak belanja jasa konsultansi survey kepuasan masyarakat atas kinerja DLHK tahun 2020, Rp 1.862.000 adalah sisa anggaran makanan dan minuman dan perjalanan dinas luar daerah
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur		100.000.000		6.600.000	6.600.000	100,00		100,00	0	0	0	
	Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	15 dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	100,00	1 Dokumen	100,00	-	-	-	
	Peningkatan Kompetensi Aparatur	3 kegiatan	95.000.000	3 Dokumen	1.600.000	1.600.000	100,00	3 Dokumen	100,00	-	-	-	
4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		50.000.000	-	-	-				-	-		
	Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan OPD	12 bulan	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran		8.692.500.000		8.290.063.500	8.167.300.084	98,52		100	115.709.916	7.053.500	122.763.416	
	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	7 Kegiatan	6.565.650.000	7 Kegiatan	6.870.418.400	6.770.173.384	98,54	7 Kegiatan	100,00	99.307.516	937.500	100.245.016	anggaran tidak digunakan dari belanja listrik dan internet, juga ekstra fooding petugas pengelola arsip, sisa kontrak dari belanja makanan dan minuman, ATK dan Cetakan
	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	1 Kegiatan	287.500.000	1 Kegiatan	187.750.000	186.040.000	99,09	1 Kegiatan	100,00	-	1.710.000	1.710.000	sisa kontrak dari belanja modal peralatan dan mesin

		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	3 Kegiatan	1.539.350.000	3 Kegiatan	1.162.316.000	1.141.507.600	98,21	3 Kegiatan	100,00	16.402.400	4.406.000	20.808.400	sisa kontrak belanja premi asuransi daerah dan belanja pemeliharaan, dan jasa kebersihan, Jasa
		Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	1 Kegiatan	300.000.000	1 Kegiatan	69.579.100	69.579.100	100,00	1 Kegiatan	100,00	-	-	-	
6	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang			885.000.000		689.275.000	663.038.848	96,19		96,42	26.236.152	0	26.236.152	
		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	6 Kegiatan	405.140.000	6 Kegiatan	366.695.000	348.409.504	95,01	6 Kegiatan	94,43	18.285.496	-	18.285.496	anggaran tidak diserap adalah cetak kalender, dan belanja pengadaan. belanja listrik, internet,
		Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan	1 Kegiatan	324.500.000	1 Kegiatan	225.500.000	225.500.000	100,00	1 Kegiatan	100,00	-	-	-	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	3 Kegiatan	122.360.000	3 Kegiatan	85.730.000	80.878.300	94,34	3 Kegiatan	98,66	4.851.700		4.851.700	sisa anggaran STNK BBNKB , Pemeliharaan Peralatan Kantor
		Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	1 Kegiatan	33.000.000	1 Kegiatan	11.350.000	8.251.044	72,70	1 Kegiatan	72,70	3.098.956		3.098.956	sisa perjalanan dinas yang tidak dapat diserap, karena pandemi covid-19
7	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan			1.880.000.000		870.882.496	862.758.390	99,07		100,00	1.988.806	6.135.300	8.124.106	
		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Laboratorium Lingkungan	5 Kegiatan	663.690.000	5 Kegiatan	606.714.196	604.539.000	99,64	5 Kegiatan	100,00	105.196	2.070.000	2.175.196	Sisa Kontrak, belanja alat tulis kantor, belanja cetak
		Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan	1 Kegiatan	904.500.000	1 Kegiatan	12.000.000	10.364.700	86,37	1 Kegiatan	100,00	-	1.635.300	1.635.300	Sisa Kontrak belanja modal peratan dan mesin
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan	3 Kegiatan	241.810.000	3 Kegiatan	236.918.300	233.464.800	98,54	3 Kegiatan	100,00	1.023.500	2.430.000	3.453.500	Sisa Kontrak pemeliharaan alat lab, STNK dan Internet suku cadang kend.
		Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan	1 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	15.250.000	14.389.890	94,36	1 Kegiatan	100,00	860.110	-	860.110	Sisa perjalanan dinas
8	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon			1.880.000.000		786.545.004	756.181.025	96,14		100	17.962.979	12.401.000	30.363.979	
		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	11 Kegiatan	381.350.000	6 Kegiatan	385.277.000	371.932.025	96,54	6 Kegiatan	100,00	13.344.975		13.344.975	sisa ATK, Bahan baku bangunan, Telp/fax/Internet, Listrik Cetak dan Pengadaan

		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	3 Kegiatan	1.539.350.000	3 Kegiatan	1.162.316.000	1.141.507.600	98,21	3 Kegiatan	100,00	16.402.400	4.406.000	20.808.400	sisa kontrak belanja premi asuransi daerah dan belanja pemeliharaan, dan jasa kebersihan, jasa
		Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	1 Kegiatan	300.000.000	1 Kegiatan	69.579.100	69.579.100	100,00	1 Kegiatan	100,00	-	-	-	
6	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang			885.000.000		689.275.000	663.038.848	96,19		96,42	26.236.152	0	26.236.152	
		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	6 Kegiatan	405.140.000	6 Kegiatan	366.695.000	348.409.504	95,01	6 Kegiatan	94,43	18.285.496	-	18.285.496	anggaran tidak diserap adalah cetak kalender, dan belanja pengadaan. belanja listrik, internet,
		Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan	1 Kegiatan	324.500.000	1 Kegiatan	225.500.000	225.500.000	100,00	1 Kegiatan	100,00	-	-	-	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	3 Kegiatan	122.360.000	3 Kegiatan	85.730.000	80.878.300	94,34	3 Kegiatan	98,66	4.851.700		4.851.700	sisa anggaran STNK BBNKB , Pemeliharaan Peralatan Kantor
		Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	1 Kegiatan	33.000.000	1 Kegiatan	11.350.000	8.251.044	72,70	1 Kegiatan	72,70	3.098.956		3.098.956	sisa perjalanan dinas yang tidak dapat diserap, karena pandemi covid-19
7	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan			1.880.000.000		870.882.496	862.758.390	99,07		100,00	1.988.806	6.135.300	8.124.106	
		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Laboratorium Lingkungan	5 Kegiatan	663.690.000	5 Kegiatan	606.714.196	604.539.000	99,64	5 Kegiatan	100,00	105.196	2.070.000	2.175.196	Sisa Kontrak, belanja alat tulis kantor, belanja cetak
		Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan	1 Kegiatan	904.500.000	1 Kegiatan	12.000.000	10.364.700	86,37	1 Kegiatan	100,00	-	1.635.300	1.635.300	Sisa Kontrak belanja modal peratan dan mesin
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan	3 Kegiatan	241.810.000	3 Kegiatan	236.918.300	233.464.800	98,54	3 Kegiatan	100,00	1.023.500	2.430.000	3.453.500	Sisa Kontrak pemeliharaan alat lab, STNK dan Internet suku cadang kend.
		Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan	1 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	15.250.000	14.389.890	94,36	1 Kegiatan	100,00	860.110	-	860.110	Sisa perjalanan dinas
8	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon			1.880.000.000		786.545.004	756.181.025	96,14		100	17.962.979	12.401.000	30.363.979	
		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	11 Kegiatan	381.350.000	6 Kegiatan	385.277.000	371.932.025	96,54	6 Kegiatan	100,00	13.344.975		13.344.975	sisa ATK, Bahan baku bangunan, Telp/fax/Internet, Listrik Cetak dan Pengadaan

		Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	1 Kegiatan	1.311.800.000	1 Kegiatan	311.800.000	299.399.000	96,02	1 Kegiatan	100,00	-	12.401.000	12.401.000	Sisa Kontrak Pengadaan Kendaraan bermotor
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	3 Kegiatan	106.500.000	3 Kegiatan	67.168.004	63.300.000	94,24	3 Kegiatan	100,00	3.868.004		3.868.004	STNK, BNNKB, Pemeliharaan komputer
		Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	1 Kegiatan	80.350.000	1 Kegiatan	22.300.000	21.550.000	96,64	1 Kegiatan	100,00	750.000		750.000	Perjalanan dinas
9	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan			1.220.000.000		572.880.000	543.037.989	94,79		98,44	23.637.263	6.204.748	29.842.011	
		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	6 Kegiatan	270.150.000	6 Kegiatan	215.745.000	196.798.697	91,22	6 Kegiatan	96,94	18.946.303	-	18.946.303	Efisiensi Penyediaan makan&minum kantor (penyediaan air minum&penyediaan mamin kegiatan), Penyediaan BBM&Gas, dan Penyediaan operasional jasa kantor (Listrik, Telepon/internet)
		Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	1 Kegiatan	606.600.000	1 Kegiatan	114.800.000	111.345.500	96,99	1 Kegiatan	100	-	3.454.500	3.454.500	Efisiensi sisa kontrak pengadaan Mesin Arthesis, dan pengadaan laptop, printer dan scanner
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	3 Kegiatan	278.585.000	3 Kegiatan	239.785.000	232.643.792	97,02	3 Kegiatan	99,03	4.390.960	2.750.248	7.141.208	Efisiensi pemeliharaan kendaraan dinas operasional (suku cadang, KIR dan Pajak kendaraan bermotor&BBNKB), dan Efisiensi sisa kontrak Pemeliharaan gedung tempat kerja
		Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	1 Kegiatan	64.665.000	1 Kegiatan	2.550.000	2.250.000	88,24	1 Kegiatan	100	300.000	-	300.000	Efisiensi addcost transport
10	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten			670.000.000		869.910.000	849.107.800	97,61		100	1.315.221	19.486.979	20.802.200	
		Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	6 Kegiatan	133.000.000	6 Kegiatan	102.310.000	102.289.500	99,98	6 Kegiatan	99,98	10.000	10.500	20.500	Belanja Listrik, Pengadaan Belanja Pakaian lapangan
		Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	1 Kegiatan	437.000.000	1 Kegiatan	589.947.000	571.581.800	96,89	1 Kegiatan	96,94	-	18.365.200	18.365.200	sisa kontrak pengadaan sarana dan prasarana kantor
		Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	3 Kegiatan	70.000.000	3 Kegiatan	169.353.000	166.986.500	98,60	3 Kegiatan	98,60	1.255.221	1.111.279	2.366.500	Belanja sarana prasarana kantor dan sisa kontrak pemeliharaan gedung tempat kerja

		Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerahpada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	8.300.000	8.250.000	99,40	1 Kegiatan	99,40	50.000	-	50.000	Transportasi
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	50,87		50,87				62,94	123,73				
2	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup			4.009.365.000		1.886.709.500	1.853.177.651	98,22		100	28.946.599	4.585.250	33.531.849	
		1 : Indeks Kualitas Air	52,5 Nilai		52,5 Nilai				54,83 nilai	104,44				
		2 : Indeks Kualitas Udara	66,8 Nilai		66,8 Nilai				73,74 nilai	110,39				
		3 : Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	16,90%		16,90%				17,17%	101,60				
11	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup			450.000.000		285.410.000	283.556.000	99,35		100	1.694.000	160.000	1.854.000	
		Pemantauan kualitas Air dan kerusakan situ/danau	2 Dokumen	236.310.000	2 Dokumen	185.314.000	183.620.000	99,09	2 Dokumen	100	1.694.000	-	1.694.000	Perjalanan dinas dan Jasa Pengujian
		Pemantauan kualitas udara ambien	1 Dokumen	186.920.000	1 Dokumen	100.096.000	99.936.000	99,84	1 Dokumen	100	-	160.000	160.000	belanja bahan pakai habis
		Penyusunan dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan	1 Dokumen	26.770.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3			1.784.365.000		1.098.697.000	1.069.828.119	97,37		100	24.992.631	3.876.250	28.868.881	
		Penyusunan dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3	1 dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	70.715.500	88,39	1 Dokumen	100	8.784.500	500.000	9.284.500	sisa anggaran tidak digunakan berasal dari sisa anggaran kode rekening belanja perjalanan dinas luar daerah, sisa anggaran kontrak berasal dari kode rekening paket konsultasi FS
		pengelolaan sampah	1 dokumen	1.584.365.000	1 Dokumen	986.737.000	973.683.619	98,68	1 Dokumen	100	9.677.131	3.376.250	13.053.381	sisa anggaran tidak digunakan berasal dari Perjalanan dinas luar daerah, belanja premi asuransi dan uang makan tambahan, sisa kontrak berasal dari kode rekening belanja peralatan kebersihan dan belanja sewa alat-alat besar darat
		Pemantauan dan Evaluasi pengelola limbah B3	1 dokumen	120.000.000	1 Dokumen	31.960.000	25.429.000	79,57	1 Dokumen	100	6.531.000	-	6.531.000	sisa anggaran tidak digunakan berasal dari kode rekening perjalanan dinas dalam daerah dan dokumentasi

13	Pemeliharaan Lingkungan Hidup			800.000.000		225.795.000	224.455.080	99,41		100	1.099.920	240.000	1.339.920	
		Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Secara Lestari	2 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	27.150.000	27.150.000	100,00	1 Dokumen	100	-	-	-	
		Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	2 Dokumen	652.150.000	1 Dokumen	145.275.000	144.517.000	99,48	1 Dokumen	100	518.000	240.000	758.000	Sisa Kontrak dan Perjalanan dinas
		Pengembangan mangrove provinsi Banten	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	28.450.000	27.993.000	98,39	1 Dokumen	100	457.000	-	457.000	Perjalanan dinas
		Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah	1 Dokumen	57.850.000	1 Dokumen	24.920.000	24.795.080	99,50	1 Dokumen	100	124.920	-	124.920	Perjalanan dinas
14	Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan			300.000.000		137.887.500	137.386.452	99,64		100	501.048	0	501.048	
		Akreditasi/Surveillance	30 parameter	300.000.000	30 Parameter	137.887.500	137.386.452	99,64	30 Parameter	100	501.048	-	501.048	Belanja jasa pengujian , perjalanan dinas
15	Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan			300.000.000		138.920.000	137.952.000	99,30		100	659.000	309.000	968.000	
		Pengambilan sampel, pengujian dan Analisa Sampel Internal	174 sampel	250.000.000	101 Sampel	125.630.000	125.013.000	99,51	101 Sampel	100	308.000	309.000	617.000	Sisa Transport dan Sisa kontrak
		Pelayanan Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal	25 sampel	50.000.000	5 Sampel	13.290.000	12.939.000	97,36	5 Sampel	100	351.000	-	351.000	Sisa Transport
16	Penguatan Early Warning System untuk Bencana Lingkungan Hidup (DAK)			375.000.000		-								
		Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Air dan Merkuri		375.000.000	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan			1.130.000.000		553.829.000	536.869.100	96,94			16.810.000	149.900	16.959.900	
		1 : Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	68 Kelompok/ Lembaga		68 Kelompok/ Lembaga				73 kelompok	107,35				
		2 : Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	98%		98%				98%	100,00				
17	Perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup			330.000.000		155.400.000	150.645.000	96,94		100	4.750.000	5.000	4.755.000	
		Penyusunan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan	5 dokumen	223.950.000	2 Dokumen	101.300.000	101.295.000	99,95	2 Dokumen	100	0	5.000	5.000	Sisa Kontrak
		Kajian Lingkungan Hidup Strategis	1 dokumen	44.600.000	1 Dokumen	23.700.000	22.450.000	94,73	1 Dokumen	100	1.250.000	0	1.250.000	Narsun dan Perjalanan dinas
		Tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan	1 dokumen	61.450.000	1 Dokumen	30.400.000	26.900.000	88,49	1 Dokumen	100	3.500.000	0	3.500.000	Belanja jasa narasumber
18	Pelayanan pengaduan dan penegakan hukum			400.000.000		135.419.000	123.359.000	91,09		100	12.060.000	0	12.060.000	
		Penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	59.333.000	51.286.000	86,44	1 Dokumen	100	8.047.000	0	8.047.000	perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
		Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	76.086.000	72.073.000	94,73	1 Dokumen	100	4.013.000	0	4.013.000	perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
19	Peningkatan kapasitas lingkungan hidup			400.000.000		263.010.000	262.865.100	99,94		100	0	144.900	144.900	
		Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	25 Lembaga	249.720.000	25 Lembaga	167.930.000	167.930.000	100,00	25 Lembaga	100	-	0	0	
		Penilaian Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten	7 Lembaga	32.950.000	0 Lembaga	10.080.000	10.080.000	100,00	0 Lembaga	100	-	0	0	
		Pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat	2 Lembaga	117.330.000	2 Lembaga	85.000.000	84.855.100	99,83	2 Lembaga	100	-	144.900	144.900	Sisa Kontrak

B	URUSAN PILIHAN BIDANG KEHUTANAN													
		Rasio Cakupan Tutupan Hutan	32,21%		32,21%				45,46%	141,14				
4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN			1.910.000.000		1.068.960.000	1.049.606.743	98,19			17.663.257	1.690.000	19.353.257	
		1. Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	10 (%)		10 (%)				25,38%	253,80				
		2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan wilayah pandeglang Serang cilegon	3 (kelompok)		3 (kelompok)				3 (kelompok)	100				
		3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan wilayah Lebak dan Tangerang	3 (kelompok)		3 (kelompok)				3 (kelompok)	100				
20	Perencanaan dan penatagunaan hutan			500.000.000		282.220.000	271.215.343	96,10		100	10.629.657	375.000	11.004.657	
		Perencanaan hutan	5 dokumen	373.520.000	3 Dokumen	240.595.000	234.855.943	97,61	3 Dokumen	100	5.364.057	375.000	5.739.057	Sisa Kontrak , dan Perjalanan dinas
		Pemantapan Kawasan Hutan	1 Dokumen	126.480.000	2 Dokumen	41.625.000	36.359.400	87,35	2 Dokumen	100	5.265.600	-	5.265.600	Sisa Kontrak
21	Pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan			400.000.000		393.540.000	392.020.000	99,61		100	500.000	1.020.000	1.520.000	
		Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri	1 Dokumen	305.924.000	1 Dokumen	343.564.000	342.544.000	99,70	1 Dokumen	100	-	1.020.000	1.020.000	sisa kontrak
		Penatausahaan hasil hutan	1 Dokumen	94.076.000	1 Dokumen	49.976.000	49.476.000	99,00	1 Dokumen	100	500.000	-	500.000	cetak dan penggandaan
22	Pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan			610.000.000		321.590.000	315.156.400	98,00		100	6.433.600		6.433.600	
		Pengembangan dan Promosi aneka usaha kehutanan	3 Komoditas	541.068.000	3 Komoditas	267.758.000	261.424.400	97,63	3 Komoditas	100	6.333.600	-	6.333.600	Belanja makan minum, perjalanan dinas dan uang saku
		Pengembangan kawasan bambu terpadu	1 Komoditas	68.932.000	1 Komoditas	53.832.000	53.732.000	99,81	1 Komoditas	100	100.000	-	100.000	Belanja Perjalanan dinas
23	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon			200.000.000		48.200.000	47.905.000	99,39		100	-	295.000	295.000	
		Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	3 Dokumen	42.900.000	1 Dokumen	9.150.000	9.150.000	100,00	1 Dokumen	100	-	-	0	

		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	1 Dokumen	63.400.000	0 Dokumen	-	-	0 Dokumen	-	-	-	0		
		Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	2 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	35.000.000	34.705.000	99,16	1 Dokumen	100	-	295.000	295.000	sisa kontrak
		Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	2 Dokumen	23.700.000	1 Dokumen	4.050.000	4.050.000	100,00	1 Dokumen	100	-	-	0	
24	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang			200.000.000		23.410.000	23.310.000	99,57		100	100.000	0	100.000	
		Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	3 dokumen	70.000.000	1 dokumen	6.540.000	6.440.000	98,47	1 dokumen	100	100.000	-	100.000	Belanja Cetak
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	1 Dokumen	20.000.000	0	-	-	0	-	-	-	-	0	
		Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	2 Dokumen	80.000.000	0	-	-	0	-	-	-	-	0	
		Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	2 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	16.870.000	16.870.000	100,00	1 Dokumen	100	-	-	0	
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAS DAN KONSERVASI HUTAN			6.865.000.000		5.094.209.500	4.989.621.037	97,95			69.956.163	34.632.300	104.588.463	
		1. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	20 (%)		20 (%)			36%	180					
		2. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	10 (kelompok)		10 (kelompok)			10 (kelompok)	100					
		3. Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat	180.000 (batang)		180.000 (batang)	180.080		180.010 (batang)	100					
		4. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	12,5 (%)		12,5 (%)	100		12,5 (%)	100					
		5. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon	2.500 (Ha)		2.500 (Ha)			2542,88 Ha	101,71					
		6. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang	2.500 (Ha)		2.500 (Ha)			3358,01 Ha	134,32					
25	Konservasi SDA dan Ekosistem			400.000.000		401.747.000	394.452.150	98,18		100	4.374.700	2.920.150	7.294.850	
		Pengendalian penangkar tumbuhan dan satwa liar	1 Dokumen	23.607.000	0	205.000	-	-	0	-	205.000	-	205.000	Belanja Penggandaan

		Penanganan Daerah penyangga kawasan konservasi dan Lembaga Konservasi	2 dokumen	207.779.000	2 dokumen	334.050.000	327.723.150	98,11	2 dokumen	100	4.169.700	2.157.150	6.326.850	Sisa Kontrak Pengadaan Bibit Tanaman dan Ajir, Belanja Penggandaan, Sisa Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah
		Perencanaan Pengolahan data dan Infomasi kebakaran hutan lahan, Kawasan Konservasi dan ekosistem esensial	2 Dokumen	41.954.000	1 Dokumen	15.612.000	15.612.000	100,00	1 Dokumen	100	-	-	-	
		Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten dan Lembaga Konservasi ex-situ	2 dokumen	126.660.000	1 Dokumen	51.880.000	51.117.000	98,53	1 Dokumen	100		763.000	763.000	Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan
26	Pengelolaan DAS			550.000.000		520.079.000	504.159.080	96,94		100	6.508.670	9.411.250	15.919.920	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Hutan Lahan dan Monev RHL	2 Dokumen	125.000.000	2 Dokumen	67.244.000	66.101.330	98,30	2 Dokumen	100	283.670	859.000	1.142.670	Sisa Kontrak, Perjalanan dinas
		Pengembangan kelembagaan dan peningkatan fungsi DAS	2 Dokumen	425.000.000	1 Dokumen	452.835.000	438.057.750	96,74	1 Dokumen	100	6.225.000	8.552.250	14.777.250	Honor Narasumber dan Sisa kontrak, Cetak/penggandaan, perjalanan dinas
27	Penyuluhan Kehutanan			550.000.000		266.670.000	265.268.000	99,47		100	652.000	750.000	1.402.000	
		Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan	2 Kelompok	300.000.000	2 Kelompok	76.280.000	76.080.000	99,74	2 Kelompok	100	200.000	-	200.000	Perjalanan dinas
		Pengembangan Kelembagaan data dan informasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH)	50 Kelompok	160.000.000	10 Kelompok	35.780.000	35.428.000	99,02	10 Kelompok	100	352.000	-	352.000	Perjalanan Dinas
		Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial	4 Kelompok	90.000.000	3 Kelompok	154.610.000	153.760.000	99,45	3 Kelompok	100	100.000	750.000	850.000	Sisa Kontrak dan perjalanan dinas

28	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang			1.675.000.000		1.045.468.000	1.040.555.540	99,53		134,32	651.210	4.261.250	4.912.460	
		Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	2500 ha	1.675.000.000	1000 Hektar	1.045.468.000	1.040.555.540	99,53	3.358,01 Hektar	134,32	651.210	4.261.250	4.912.460	Sisa Kontrak, Perjalanan dinas dan makan minum
29	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon			1.275.000.000		720.854.000	716.302.000	99,37		100	4.482.000	70.000	4.552.000	
		Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	2500 Ha	1.275.000.000	1000 Ha	720.854.000	716.302.000	99,37	2542,88 Ha	101,72	4.482.000	70.000	4.552.000	Sisa Kontrak dan Perjalanan Dinas
30	Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan			850.000.000		887.413.500	881.010.967	99,28		100	4.839.383	1.563.150	6.402.533	
		Penyediaan bibit tanaman hutan dan produktif	180.000 batang	575.614.500	160.000 batang	652.234.500	649.335.500	99,56	180.010 batang	100	1.640.000	1.259.000	2.899.000	Perjalanan dinas, HOK dan Sisa Kontrak
		Pengembangan Tanaman Hutan dan Produktif	100 batang	274.385.500	100 batang	235.179.000	231.675.467	98,51	100 batang	100	3.199.383	304.150	3.503.533	BBM, HOK Perdin dan Sisa kontrak
31	Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan			374.991.000		174.461.000	169.030.000	96,89			1.016.000	4.415.000	5.431.000	
		Pengendalian pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan	1 Dokumen	143.355.000	1 Dokumen	81.715.000	76.671.000	93,83	1 Dokumen	100	629.000	4.415.000	5.044.000	Honor Narsum, Sisa Kontrak bahan percontohan
		Pengawasan benih tanaman hutan	1 Dokumen	40.830.000	1 Dokumen	4.780.000	4.780.000	100,00	1 Dokumen	100	-	-	-	
		Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS	1 Dokumen	151.253.000	1 Dokumen	48.413.000	48.026.000	99,20	1 Dokumen	100	387.000	-	387.000	Sisa belanja Pengandaandan perjalanan dinas
		Pemeliharaan Arboreteum/ kebun koleksi	1 Dokumen	39.553.000	1 Dokumen	39.553.000	39.553.000	100,00	1 Dokumen	100	-	-	-	
32	Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten			250.000.000		375.579.000	372.714.000	99,24		100	200.000	2.665.000	2.865.000	
		Perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA	1.595,9 Ha	170.000.000	1.595,9 Hektar	117.919.000	117.719.000	99,83	1.595,9 Hektar	100	200.000		200.000	belanja Jasa Tenaga ahli
		Reboisasi dan Rehabilitasi lahan serta pengawetan keanekaragaman hayati	12,5 hektar	80.000.000	12,5 Hektar	257.660.000	254.995.000	98,97	12,5 Hektar	100	-	2.665.000	2.665.000	sisa kontrak narsum dan perjalanan dinas

33	Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten			700.000.000		701.938.000	646.129.300	92,05		100	47.232.200	8.576.500	55.808.700	
		Pengembangan Kawasan TAHURA Banten	2 Dokumen	509.589.000	2 Dokumen	476.982.000	427.310.800	89,59	2 Dokumen	100	47.232.200	2.439.000	49.671.200	sisa kontrak dan makan minum, perjalanan dinas uang saku
		Pemanfaatan Kawasan Tahura Banten	2 Dokumen	190.411.000	2 Dokumen	224.956.000	218.818.500	97,27	2 Dokumen	100	-	6.137.500	6.137.500	sisa kontrak
34	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif dan Sipil Teknis di Luar Kawasan Hutan (DAK)			240.009.000		0								
		Pengembangan Hutan Rakyat	15 hektar	120.009.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gully Plug	10 unit	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sumur Resapan	4 Unit	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BTL + BL				69.755.865.000		49.093.844.000	48.173.224.882	98,12			826.650.141	93.968.977	920.619.118	

B. Pencapaian Capaian Pelaksanaan Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2020

a. Capaian Pelaksanaan Kinerja Sasaran

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah menyelenggarakan bidang urusan pemerintah daerah terdiri dari: **(a) urusan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Lingkungan hidup, (b) Urusan Pilihan Bidang Kehutanan.**

Secara umum pelaksanaan Sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2020 berjalan dengan baik. Target realisasi serta capaian Indikator kinerja sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Sasaran dan Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Th 2020	Realisasi Th 2020	Pencapaian Th 2020
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Banten (Satuan : Nilai)	80,00 (BB)	80,21 (A)	100,26%
2	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (satuan : nilai)	50,87	62,94	123,73 %
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan (Satuan : %)	32,21	45,46	141,14%

1. Capaian Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator sasaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra 2017-2022 nilai target 2020 sebesar 80 akan tetapi perhitungan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat nilai untuk tahun 2020 sebesar 80,21 (A) yang dilaksanakan pada awal tahun 2021.

2. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran yang hendak dicapai adalah Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas yang terlihat dari indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Provinsi Banten. Pada akhir tahun 2020 IKLH Provinsi Banten mencapai 62,94 point (kategori sedang) ada kenaikan IKLH sebesar $\pm 6,08$ point dibandingkan dengan IKLH tahun 2019 yang mencapai 56,86 point.

Dengan perhitungan IKLH Tahun 2020 :

No	IKK Output	IKK Outcome
1	Hasil Perhitungan Provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) = 54,83 b. Indeks Kualitas Udara (IKU)= 73,74 c. Indeks Kualitas Lahan (IKL) = 37,09 d. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) = 78,91	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) $= (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$ $= (0,340 \times 54,83) + (0,428 \times 73,74) + (0,133 \times 37,09) + (0,099 \times 78,91)$ $= 18,64 + 31,56 + 4,93 + 7,81$ $= \mathbf{62,94}$ $= \mathbf{Kategori Sedang}$

Ket :

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKA = Indeks Kualitas Air

IKL = Indeks Kualitas Lahan

IKAL = Indeks Kualitas Air Laut

KLASIFIKASI KATEGORI NILAI IKLH 2020-2024

SKOR	KRITERIA
90 - 100	Sangat Baik
70 – 89,9	Baik
50 – 69,9	Sedang
25 – 49,9	Buruk
0 – 24,9	Sangat Buruk

3. Capaian Rasio Cakupan Tutupan Hutan

Sasaran yang hendak dicapai adalah Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal dengan indikator Rasio Cakupan Tutupan Hutan. Pada tahun 2020 Rasio Tutupan Hutan adalah 45,46 % terdapat kenaikan $\pm 7,12$ % di bandingkan Pada tahun 2019 dengan nilai Rasio Tutupan Hutan adalah 39,53 %. Dengan rincian perhitungan :

$$\frac{Luas_{ht.negara} + Luas_{ht.rakyat}}{Luas_{Provinsi}} \times 100\%$$

1. Luas Hutan Negara di Provinsi Banten seperti pada tabel 3.2 berikut :

Tabel. 2.5 Luas Hutan Negara di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Hutan Konservasi (Suaka Alam dan Pelestarian Alam)		Hutan Produksi		Jumlah Luas Hutan dan Perairan
		Darat	Perairan	Terbatas	Tetap	
1	2	3	4	5	6	8
Kabupaten						
Lebak	3.324,76	32.014,00	0,00	30.641,06	16.924,91	82.904,73
Pandeglang	4.298,46	62.953,36	44.337,00	7.059,00	26.456,04	145.103,86
Serang	717,14	5.590,35	720,00	1.882,84	901,88	9.812,21
Tangerang	1.601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,60
Kota						
Kota Cilegon	454,82	0,00	0,00	0,00	244,28	699,10
Kota Serang	0,00	32,85	0,00	0,00	177,52	210,37
Kota Tangerang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kota Tangerang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANTEN	10.396,78	100.590,56	45.057,00	39.582,90	44.704,63	240.331,87

Untuk penghitungan luas kawasan hutan Negara hanya menggunakan luas kawasan hutan daratan saja, yaitu: 195.274,87 Ha

2. Luas Hutan Rakyat :

Dengan menggunakan definisi hutan rakyat, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 % (Permenhut P.70/2008).

Ratio Cakupan Tutupan Hutan :

$$((195.274,87 + 243.983,45)/966.292) \times 100\% = 45,46\%$$

b. Capaian Pelaksanaan Kinerja Program

Urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup dilaksanakan melalui **3 (tiga) program** yaitu :

- (1) **Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan melalui 5 kegiatan diperubahan anggaran tahun 2020
- (2) **Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan melalui 3 Kegiatan
- (3) **Program Tata Kelola Pemerintahan**, yang dilaksanakan melalui 9 Kegiatan di perubahan anggaran Tahun 2020

Urusan pilihan bidang kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dilaksanakan melalui **2 (dua) program**, yaitu :

- (1) **Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan**, yang dilaksanakan melalui 5 kegiatan.
- (2) **Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan**, yang dilaksanakan melalui 9 kegiatan.

Adapun Target, Realisasi serta capaian Indikator Kinerja Program pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2020 ini adalah seperti pada tabel 3.3 dan uraian berikut ini :

Tabel 2.6 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program DLHK Provinsi Banten Tahun 2020

NO	Urusan /Program/Indikator Program	Satuan	2020		Persentase (%)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
A	Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup				
I	Program Tata Kelola Pemerintahan				
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	100	100	100
2	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	100
3	Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	100
4	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	100	100	100
II	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan				
1	Indeks Kualitas Air (nilai)	Nilai	52,5	54,83	104,44
2	Indeks Kualitas Udara (nilai)	Nilai	66,8	73,74	110,39
3	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)	%	16,9	17,17	101,59
III	Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup				
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kelompok/Lemba ga	68	73	107,35
2	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	%	98	98	100,00
B	Urusan Pilihan Kehutanan				
IV	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan				
1	Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	%	10	25,38	253,80
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Klpk	3	3	100,00
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Klpk	3	3	100,00

NO	Urusan /Program/Indikator Program	Satuan	2020		Persentase (%)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
V	Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan				
1	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	%	20	36	180,00
2	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	Klpk	10	10	100,00
3	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	%	12,5	12,5	100,00
4	Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon	ha	2.500	2.542,88	101,71
5	Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang	ha	2.500	3.358,01	134,32
6	Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat	btg	180.000	180.000	100,00

(1) Program Tata Kelola Pemerintahan

Program Tata Kelola Pemerintahan Capaian Sasaran Program Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien. Program ini adalah program baru yang baru dilaksanakan pada tahun 2020, dengan target 100 % dan capaian mencapai 100 % Sedangkan capaian pada tahun sebelumnya (tahun 2019) hanya menggunakan 1 indikator yaitu indikator kinerja Nilai IKM dengan target 3 satuan Nilai dengan capaian sebesar 3,34 satuan nilai atau sebesar 111,13 %.

Pada tahun 2020 Program Tata Kelola Pemerintahan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian antara lain :

1. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah dengan target 100 % dan capaian kinerja nya pada tahun 2020 adalah 100%
2. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD dengan target 100 % dan capaian kinerja nya pada tahun 2020 adalah 100%

3. Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD dengan target 100 % dan capaian kinerja nya pada tahun 2020 adalah 100%
4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah dengan target 100 % dan capaian kinerja nya pada tahun 2020 adalah 100%

(2) Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup antara lain :

1. Meningkatnya Indeks Kualitas Air,

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada 7 sungai (Cisadane, Cidurian, Cibanten, Cirarab, Cimanceri, Cidanau, Ciujung) yang merupakan sungai utama lintas Kab/Kota. Masing-masing sungai dilakukan pemantauan sebanyak 6 (enam) titik selama 3 (tiga) bulan. Parameter yang dipantau meliputi :TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, *Fecal Coli*, dan *Total Coliform*.

Berdasarkan hasil analisa laboratorium dan hasil penghitungan indeknya, diperoleh hasil IKA Provinsi Banten tahun 2020 adalah 54,83. Angka tersebut berdasarkan pengklasifikasian peringkat masuk dalam kategori “sedang” ($50 \leq IKA \leq 60$). Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain : penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan pada beberapa sumber air; ketersediaan dan fukuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; penggunaan air; serta tingkat erosi dan sedimentasi. Sehingga dalam rangka meningkatkan IKA juga harus bersenergi dengan

program dan kegiatan unit internal DLHK yang terkait, OPD lainnya dan Kab/Kota serta pelaku usaha.

Target tahun 2020 sebesar **52,50 point** kondisi Realisasi pada akhir tahun 2020 mencapai **54,83 point**, terdapat kenaikan sekitar $\pm 2,76$ point dibandingkan dengan capaian tahun 2019 mencapai **52,07 point**.

2. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara,

IKU (Indeks Kualitas Udara) merupakan alat ukur sederhana berupa angka untuk menginformasikan kualitas udara ambien suatu daerah. IKU diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara. Pada tahun 2020, DLHK Provinsi melakukan pengambilan sample udara ambien di 8 Kab/Kota pada 4 lokasi (mewakili daerah transportasi, industri, pemukiman, komersial/perkantoran). Kegiatan pengambilan sample udara dilakukan 2 (dua) kali pertahun. Tahap I mewakili musim kemarau dan tahap II mewakili musim penghujan.

Pengukuran kualitas udara ambien selama satu tahun dengan parameter pencemar udara berupa SO₂ (Sulfur Dioksida) dan NO₂ (Nitrogen Dioksida) menggunakan metode passive sampler bertujuan untuk menyatakan atau menyimpulkan kondisi kualitas udara di Provinsi Banten dalam bentuk Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Banten yang merupakan salah satu komponen dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Berdasarkan hasil analisa laboratorium dan hasil penghitungan indeks, diperoleh hasil IKU Provinsi Banten tahun 2020 adalah 73,74 Point. Angka tersebut berdasarkan pengklasifikasian peringkat masuk dalam kategori “baik” ($70 < \text{IKU} \leq 80$). Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Kab/Kota dan instansi terkait. Target tahun 2020 sebesar **66,80 point** Realisasi pada akhir tahun 2020 mencapai **73,74 point**, sedangkan capaian tahun 2019 adalah 73,35 naik sebesar 0,39 point dari tahun 2019.

3. Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan.

Indikator Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan baru digunakan pada tahun 2020, dengan target 16,9 % dan capaian

mencapai 17,7 %, terdapat peningkatan pencapaiannya sebesar 101,59 %. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dalam melaksanakan tugasnya UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Banten mempunyai fungsi :

- Pengujian dan analisis serta metode analisis laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan (Pelayanan Pengujian)
- Pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku
- Pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan (Pelayanan Pengujian)
- Pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan (Pembinaan mutu Laboratorium)
- Pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan (Akreditasi Laboratorium dan Uji Profisiensi)
- Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium

Dalam melaksanakan fungsi diatas maka laboratorium lingkungan wajib meningkatkan fungsinya dengan rencana kerja Tahun 2017 s/d 2022 :

1. Untuk menghasilkan data kualitas lingkungan yang valid maka laboratorium lingkungan perlu meningkatkan kompetensinya dengan cara mendapatkan pengakuan dari lembaga akreditasi yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau mendapatkan status / sertifikasi akreditasi pengujian dan laboratorium lingkungan dan selalu melaksanakan pembinaan mutu laboratorium lingkungan untuk terus menambah parameter lingkup akreditasi sehingga Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Laboratorium Lingkungan melalui :
 - a. Parameter Lingkup Akreditasi
 - b. Pembinaan Mutu Laboratorium lingkungan
2. Jika Laboratorium telah mendapat sertifikasi akreditasi maka fungsi laboratorium lingkungan untuk melaksanakan pelayanan pengambilan sampel, pelayanan pengujian dan analisis parameter lingkungan baik sampel yang dibutuhkan oleh internal yaitu Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada kegiatan pemantauan lingkungan: air sungai, situ, air sumur, udara ambient dan kebisingan atau dalam

rangka pengawasan sumber pencemaran baik instansional maupun non instansional (inspeksi industri). Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan Dalam penanganan kasus, AMDAL, UKL/UPL, Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan Dalam rangka penanganan kasus industri, uji petik emisi kendaraan) ataupun Kelompok Eksternal (Industri; Pengelola Gedung Perkantoran; Pengelola Apartement; Rumah Saakit dan Laboratorium Klinis; Hotel dan Restoran; Masyarakat dan Instansi Terkait dll) sehingga Terlaksananya pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan melalui :

- a. Pengujian dan analisis Sampel Uji Internal
 - b. Pelayanan Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal
3. Untuk mencapai terwujudnya peningkatan fungsi laboratorium lingkungan maka UPTD laboratorium lingkungan harus melaksanakan peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan dan pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan dengan didukung pelaksanaan fungsi :
- a. Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada UPT laboratorium Lingkungan
 - b. Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan
 - c. Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
 - d. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan

Pencapaian Indikator Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan Tahun 2020 adalah sebesar **17.17%** dengan analisa perhitungan antara lain :

Indikator Kerja Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan Tahun 2020 :

$$IK = \frac{\% IK Peningkatan Kompetensi + \% IK Pelayanan + \% IK Sapras + \% IK Barjas + \% IK Rakor}{Total \% IK} \times 100 =$$

$$IK = \frac{12,5 + 8,2 + 16,1 + 19,5 + 20 + 16,7 + 16,7 + 20}{755} \times 100 = \frac{129,7}{755} = 17,17 \%$$

$$\begin{aligned}\text{Total \% IK dihitung dari} &= \text{Tahun 2017} + \text{Tahun 2018} + \text{Tahun 2019} + \text{Tahun 2020} + \\ &\quad \text{Tahun 2021} + \text{Tahun 2022} \\ &= 116 + 122 + 112 + 128 + 133 + 144 = 755\end{aligned}$$

Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Laboratorium Lingkungan melalui :

- a. Parameter Lingkup Akreditasi dari Tahun 2020 sebanyak 5 parameter dari 40 parameter sampai dengan tahun 2022

$$\text{Indikator kerja lingkup akreditasi} = \frac{5 \text{ parameter}}{40 \text{ parameter}} \times 100\% = 12,5 \%$$

- b. Pembinaan Mutu Laboratorium lingkungan Tahun 2020 melaksanakan bimbingan teknis laboratorium lingkungan Kab/Kota se Provisis Banten sebanyak 75 orang dengan dengan rencana sampai tahun 2022 sebanyak 610 orang

$$\text{Indikator kerja pembinaan mutu} = \frac{50 \text{ orang}}{610 \text{ orang}} \times 100\% = 8,2 \%$$

Terlaksananya pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan melalui :

- a. Pengujian dan analisis Sampel Uji Tahun 2020 sebanyak 144 sampel , pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan internal sampai dengantahun 2022 sebanyak 894 sampel

$$\text{Indikator kerja Pengujian dan analisis} = \frac{144 \text{ sampel}}{894 \text{ sampel}} \times 100\% = 16,1 \%$$

- b. Pelayanan Pengujian dan Analisa Paremeter Kualitas Lingkungan Eksternal Tahun 2020 sebanyak 200 sampel dengan rencana s/d 2022 sebanyak 1000 sampel

$$\begin{aligned}\text{Indikator kerja Pengujian dan analisis} &= \frac{195 \text{ sampel}}{1000 \text{ sampel}} \times 100\% \\ &= 19,5 \%\end{aligned}$$

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada UPT laboratorium Lingkungan melalui:

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Laboratorium Tahun 2020 sebanyak 1 Unit dari rencana sampai dengan tahun 2022 sebanyak 15 Unit

$$\text{Indikator kerja Sarana dan Prasarana} = \frac{3 \text{ unit}}{15 \text{ unit}} \times 100\% = 20 \%$$

- b. Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan Tahun 2020 selama 12 bulan dari rencana sampai dengan tahun 2022 selama 72 bulan

$$\text{Indikator Persediaan Barang dan Jasa} = \frac{12 \text{ Bulan}}{72 \text{ Bulan}} \times 100\% = 16,7 \%$$

- c. Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah Tahun 2020 selama 12 bulan dari rencana sampai dengan tahun 2022 selama 72 bulan

$$\text{Indikator Persediaan Barang dan Jasa} = \frac{12 \text{ Bulan}}{72 \text{ Bulan}} \times 100\% = 16,7 \%$$

- d. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan Tahun 2020 selama 12 bulan dari rencana sampai dengan tahun 2022 selama 60 bulan

$$\text{Indikator Persediaan Barang dan Jasa} = \frac{12 \text{ Bulan}}{60 \text{ Bulan}} \times 100\% = 20 \%$$

(3) Program penataan penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup

Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan Indikator programnya sebagai berikut :

1. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (satuan : kelompok/lembaga). Target Tahun 2020 sebesar 68 Kelompok/Lembaga dengan realisasi yang melebihi dari target tahun 2020 sebesar 73 kelompok/Lembaga ada kenaikan realisasi sebesar 107,35 %. dengan jumlah kelompok/Lembaga sebagaimana tabel 3.4 serta perhitungannya sebagai berikut :

Tabel. 2.7 Jumlah Kelompok/Lembaga dalam pelaksanaan indikator peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

No	Kegiatan	Jumlah Kelompok/Lembaga Tahun 2020
1	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	155
2	Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	90
3	Pelayanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	31
	Jumlah	276

Target Renstra Tahun 2020 68 kelompok/Lembaga maka perhitungan realisasinya sebagai berikut :

Perhitungan = Realisasi 2020- Realisasi 2017

$$= 276 - 203 = 73 \text{ kelompok/lembaga}$$

- Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (satuan : %). Target Tahun 2020 sebesar 98 % dengan realisasi dari target tahun 2020 sebesar 98 % ada kenaikan realisasi sebesar 100 %.

Dengan perhitungan :

$$= (\text{Jumlah pelaku usaha yang diperiksa} - \text{Jumlah perusahaan yang melanggar}) / \text{Jumlah pelaku usaha yang diperiksa} \times 100\%$$

$$= (100-2)/100 \% = 98 \%$$

(4) Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dengan indikator programnya sebagai berikut :

- Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat (Satuan: %), target pada tahun 2020 mencapai 10 %, Realisasi pada akhir tahun 2020 sebesar 25,38 %, dengan perhitungan :

$$\text{Perhitungan} = \frac{(25\% \times \text{realisasi pemanfaatan kawasan}) + (50\% \times \text{realisasi hasil hutan kayu}) + (25\% \times \text{realisasi HHBK})}{(\text{baseline pemanfaatan kawasan} + \text{baseline hasil hutan kayu} + \text{baseline HHBK})} \times 100 \%$$

$$1). \quad 25\% \times \frac{(4475,86)}{195.000} = 2,29$$

$$\bullet \quad 25\% \times 0,022 = 0,57$$

$$2). \quad 50\% \times \frac{(582150,819)}{1200000} = 48,5$$

$$\bullet \quad 50\% \times 48,5 = 24,5$$

$$3). \quad 25\% \times \frac{(5)}{4} = 1,25$$

$$\bullet \quad 25\% \times 1,25 = 0,31$$

$$\text{Perhitungan} = 0,57 + 24,5 + 0,31 = \mathbf{25,38\%}$$

2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan wilayah pandeglang, Serang dan Cilegon (klpk). Target Tahun 2020 sebesar 3 Kelompok dengan realisasi yang melebihi dari target tahun 2020 sebesar 3 kelompok ada kenaikan realisasi sebesar 100 %. Dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Kelompok yang memanfaatkan hasil hutan meningkat 3 kelompok pertahun, Peningkatan Peran serta masyarakat = Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok per tahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, kel Perlindungan dan pengamanan hutan) 3 Kelompok tersebut terdiri dari :

1. Kelompok Masyarakat mitra polhut (Pandeglang)
2. Penangkar TSL (Cilegon)
3. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) (ujung kulan, perhutani, BKSDA,)

3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (klpk). Target Tahun 2020 sebesar 3 Kelompok dengan realisasi yang melebihi dari target tahun 2020 sebesar 3 kelompok ada kenaikan realisasi sebesar 100 %. Dengan keterangan sebagai berikut :

Jumlah Kelompok yang memanfaatkan hasil hutan meningkat 3 kelompok pertahun, Peningkatan Peran serta masyarakat = Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok per tahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, kel Perlindungan dan pengamanan hutan), 3 Kelompok tersebut terdiri dari :

1. Kelompok Masyarakat mitra polhut (perhutani)
2. Penangkar TSL (Lebak)
3. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) (perhutani, TNGHS)

(5) Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan

Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan Indikator capaian programnya sebagai berikut :

1. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)(%). Target Tahun 2020 sebesar 20 % dengan realisasi yang melebihi dari target tahun 2020 sebesar 36 % ada kenaikan realisasi sebesar 180 %. Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Realisasi DAS yang ditangani} + \sum \text{Realisasi KEE yang ditangani}}{\sum \text{Target DAS} + \sum \text{Target KEE}} \times 100$$

$\sum$ TARGET KEE = 14

Kab Serang : 1) Taman Kehati Cikolet/Kadu beureum 2) Pulau Kamujan Kecil

Kab Pandeglang : 3) Hutan Medong, 4) Situ Cikedal

Kab Lebak : 5) Hutan Adat Baduy. 6) Ekosistem Karst Sawarna

Kab Tangerang : 7). Pulau Cangkir. 8) Tangerang Mangrove Center

Kota Serang : 9) Hutan Kota Curug, 10) Mangrove Center Sawah Luhur

Kota Tangsel : 11) Hutan Puspitek 12) Taman Kota Puspitek BSD

Kota Tangerang : 13) Bantaran Cisadane, 14) Situ Cipondoh

$\sum$ Target DAS : 5

Cidurian, Ciujung, Cibanten, Cidanau, Cisadane

$\sum$ Realisasi KEE : 1) Kehati Lebak, 2) Mangrove Center Sawah Luhur, 3) Keanekaragaman hayati Padarincang Ciomas

Σ Realisasi DAS : Cidurian, Ciujung, Cibanten, Cidanau

Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)(%) :

$$= \frac{4 + 3}{5 + 14} = 0,36 = 36\%$$

2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan (klpk) yang artinya Meningkatnya jumlah kelompok/lembaga yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan rumus :

Jumlah Kelompok atau Lembaga seperti :

- Kelompok Masyarakat
- LSM
- Lembaga
- Masyarakat Hukum Adat

Target Tahun 2020 sebesar 10 Kelompok dengan realisasi tahun 2020 sebesar 10 Kelompok dengan capaian kinerjanya sebesar 100 %.

3. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA (satuan : %). Target Tahun 2020 sebesar 12,5 % dengan realisasi yang melebihi dari target tahun 2020 sebesar 12,5 % ada kenaikan realisasi sebesar 100 %.

4. Luas Lahan kritis yang ter rehabilitasi di wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon (Ha). Target Tahun 2020 sebesar 2.500 Ha dengan realisasi yang melebihi dari target tahun 2020 sebesar 2542,88 Ha ada kenaikan realisasi sebesar 101,71 %. Dengan rincian sebagai berikut :

Total Rehabilitasi Lahan Secara Vegetatif Tahun 2020 seluas = **2.542,88 Ha**

REALISASI KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN SECARA VEGETATIF								
PADA WILAYAH KERJA CABANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH PANDEGLANG, SERANG DAN CILEGON								
TAHUN ANGGARAN 2020								
Target Pada Renstra DLHK		2,5 Hektar						
Realisasi		2.542,88 Hektar						
No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Tolok Ukur/Kelompok Penerima	Sumber Dana	Status Lahan/Lokasi Tanam	Peruntukan Kegiatan	Jenis Bantuan/Kegiatan yang Dilaksanakan			Luas Area Tanam (Ha)
					Jenis	Jumlah	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Rehabilitasi Lahan HK Pro. Banten T.A. 2020		APBD Prov. Banten						
1	Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD) 8 Kelompok		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	320.000	Batang	800,00
2	Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD) Mangrove 2 Kelompok		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	60.000	Batang	30,00
2	Pembangunan Hutan Rakyat Pengkayaan (HRP) 2 Kelompok @ 6250		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	12.500	Batang	31,25
3	Pemberdayaan Masy (5 KTH @800 btg)		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	4.000	Batang	10,00
4	Pengelolaan DAS		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	2.500	Batang	6,25
5	Konservasi SDA dan Ekosistem (2 unit)		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	5.680	Batang	14,20
6	Penanaman oleh Masy sumber Bibit UPSTH DLHK Banten		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	89.734	Batang	224,34
B. Rehabilitasi Hutan dan Lahan BPDAS-HL TA. 2020		APBN BPDAS-HL						
1	Kebun Bibit Rakyat (KBR) 8 Kelompok		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	240.000	Batang	600,00
2	Penanaman Mangrove (PEN)		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	413.600	Batang	138,00
C. Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Perhutani		BUMN						
1	Perhutani dan KTH/LMDH		Kawasan Hutan	Perhutanan Sosial	Bibit Pohon	70.000	Batang	118,00
No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Tolok Ukur/Kelompok Penerima	Sumber Dana	Status Lahan/Lokasi Tanam	Peruntukan Kegiatan	Jenis Bantuan/Kegiatan yang Dilaksanakan			Luas Area Tanam (Ha)
					Jenis	Jumlah	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D. Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Distan Banten		APBD Prov Banten						
1	Penanaman Manggis di Kec. Carita Pandeglang		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	20.000	Batang	50,00
E. Rehabilitasi Lahan secara Swadaya dan CSR		Swadaya						
1	PT. Banten Energy Lestari		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon		Batang	90,00
2	Penanaman oleh POLDA		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	20.000	Batang	50,00
3	LSM dlm rangka hari jadi Kab. Serang		Lahan Milik Masyarakat	Penghijauan Lingkungan	Bibit Pohon	494	Batang	1,24
4	KTH Alam Lestari (Akasia) Cibaliung		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	30.000	Batang	75,00
5	Klp Masy Cibaliung Pandeglang		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	25.000	Batang	62,50
6	Klp Masy Sobang Pandeglang		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	20.000	Batang	50,00
7	Klp Masy Cigeulis Pandeglang		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	10.000	Batang	25,00
8	Klp Masy Munjul Pandeglang		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	5.000	Batang	12,50
9	Klp Masy Cinangka Serang		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	5.000	Batang	12,50
9	Astra Infra		Jalan Tol	Penghijauan Lingkungan	Bibit Pohon	443	Batang	1,11
10	Klp Masy Munjul Pandeglang		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	4.400	Batang	11,00
11	Penanaman oleh Polres Pandeglang		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	1.999	Batang	5,00
						Jumlah	1.148.014 Batang	2.542,88

5. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi diwilayah Lebak dan Tangerang(Ha). Target Tahun 2020 sebesar 2.500 Ha dengan realisasi yang melebihi dari target tahun 2020 sebesar 3358,01 Ha ada kenaikan realisasi sebesar 134,32 %. Dengan rincian sebagai berikut :

Total Rehabilitasi Lahan Secara Vegetatif Tahun 2020 seluas = 3.358,01 Ha

REALISASI KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN SECARA VEGETATIF								
PADA WILAYAH KERJA CABANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG								
TAHUN ANGGARAN 2020								
Target pada Renstra DLHK :	2.500,00	Hektar						
Realisasi :	3.358,01	Hektar	Persentasi	134,32%				
NO.	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR/ KELOMPOK PENERIMA	SUMBER DANA	STATUS LAHAN/ LOKASI TANAM	PERUNTUKAN KEGIATAN	JENIS BANTUAN/ KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN			LUAS AREAL TANAM (HEKTAR)
					JENIS	JUMLAH	SATUAN	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
TOTAL REHABILITASI LAHAN SECARA VEGETATIF					Bibit Pohon	2.069.285	btg	3.358,01
i.	REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA CDLHK-LT TA. 2020	APBD Provinsi Banten	Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	350.280	btg	250,00
a.	Pembuatan Kebun Bibit Desa		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	650.560	btg	200,00
b.	Hutan Rakyat Pengkayaan (Enrichment Planting)		Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	25.000	btg	50,00
ii	REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN BPDAS-HL TA. 2020	APBN BPDAS-HL			Bibit Pohon	1.719.005	btg	3.108
a.	Kebun Bibit Desa	APBN BPDAS-HL	Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	1.299.005	btg	2.520
b.	Kebun Bibit Rakyat	APBN BPDAS-HL	Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	180.000	btg	150,00
c.	RHL Pada Kawasan Perum Perhutani Divisi Regional III Jabar-Banten	APBN BPDAS-HL	Kawasan Hutan Perum Perhutani KPH Banten	Pembuatan Tanaman (P0)	Bibit Pohon	219.005	btg	438,01

6. Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat (satuan: batang). Target Tahun 2020 sebesar 180.000 batang dengan realisasi yang melebihi dari target tahun 2020 sebesar 180.010 batang ada kenaikan realisasi sebesar 100 %. dengan rincian sebagai berikut :

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN STOCK OPNAME BIBIT TANAMAN PADA UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN SEKSI PERBENIHAN TAHUN 2020

No	Jenis Bibit	Stock Akhir 31 Desember 2019	Stock Opname Bibit Baru/ Produksi 2020	Bibit Keluar	Total Hati Bibit	Stock Akhir	Ket
1	Albasiah Tahun 2019	40.124	-	21.294	18.830	-	
2	Albasiah Tahun 2020	-	164.918	13.528	38.962	112.418	
3	Jabon	-	-	-	-	-	
4	Mahoni Tahun 2018	1.218	-	1.218	-	-	
5	Mahoni Tahun 2019	3.141	-	3.091	-	50	
6	Rambutan Tangkai Okulasi 75 cm Tahun 2020	-	300	360	-	(60)	
7	Mangga Okulasi 150 Cm Tahun 2019	114	-	114	-	-	
8	Mangga Okulasi 1 m Tahun 2020	-	500	507	-	(7)	
9	Durian Okulasi 75 Cm Tahun 2020	-	300	310	-	(10)	
10	Durian Okulasi 150 Cm Tahun 2019	132	-	132	-	-	
11	Sukun 1,5 M Tahun 2020	-	350	98	-	252	
12	Cengkeh 75 Cm Tahun 2020	23	104	104	-	-	
13	Kelengkeng Okulasi 150 Cm Tahun 2019	-	-	4.104	-	970	
14	Trembesi Tahun 2019	5.074	-	-	-	2.635	
15	Trembesi Tahun 2020	-	5.285	2.650	-	-	
16	Lada	-	-	-	-	-	
17	Jati Tahun 2020	-	750	300	-	450	
18	Alpukat YM Okulasi 50 Cm Tahun 2019	45	-	45	-	-	
19	Pulai Tahun 2018	4.353	-	4.353	-	-	
20	Pulai Tahun 2019	2.982	-	3.082	-	(100)	
21	Durian Seedling Tahun 2018	367	-	367	-	-	
22	Rambutan Seedling Tahun 2018	547	-	547	-	-	
23	Mangga Seedling Tahun 2018	539	-	539	-	-	
24	Durian Mata Enters	10	-	10	-	-	
25	Mangga Sembung Picul	140	-	140	-	-	
26	Ketapang Laut 1,5 M Tahun 2020	190	200	390	-	-	
27	Ketapang Laut Tahun 2020	-	782	635	-	147	
28	Ketapang Kencana Tahun 2019	181	-	221	-	(40)	
29	Ketapang Kencana 1,5 M Tahun 2020	-	200	110	-	90	
30	Gaharu Tahun 2020	-	101	-	-	101	
31	Bibit Jengkol 75 Cm Tahun 2020	-	1.000	642	-	358	
32	Bibit Peta 75 Cm Tahun 2020	-	350	329	-	21	
33	Bibit Kopi robusta 50 cm Tahun 2020	-	500	375	-	125	
34	Bibit Manggis 75 Cm Tahun 2020	-	-	-	-	-	
35	Bibit Manglid Tahun 2020	-	672	30	-	642	
36	Bibit asem krang 50 Cm 2020	-	200	-	-	200	
37	Bibit Kelengkeng Okulasi 70 Cm 2020	-	800	22	-	778	
38	Bibit Durian Okulasi 70 Cm 2020	-	350	25	-	325	
39	Bibit Jeruk Limau/Limo Okulasi 50 Cm 2020	-	300	-	-	300	
40	Bibit Mangga Golek 60 Cm 2020	-	400	80	-	320	
41	Bibit Melinjo 2020	-	200	-	-	200	
42	Bibit Jambu Air Deli Madu Okulasi 50 cm 2020	-	400	2	-	398	
43	Bibit Sawo Besar madu Canglok 60 Cm 2020	-	100	14	-	86	
44	Bibit Pala Bendera 60 Cm 2020	-	150	-	-	150	
45	Bibit Manggis Seedling 50 Cm 2020	-	100	-	-	100	
46	Bibit Durian Sireupah Okulasi 50 Cm 2020	-	450	137	-	313	
47	Bibit Jambu Air Citra Besar 70 Cm 2020	-	200	2	-	198	
48	Bibit Mangga Gedong Gincu/ harumanis 2020	-	150	45	-	105	
Jumlah		59.284	180.010	59.952	57.792	121.550	-

C. Capaian Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan (Keluaran) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2020 dilaksanakan dalam dua Urusan Pemerintahan antara lain Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pilihan Kehutanan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 3 Program dan 17 Kegiatan serta Urusan Pilihan Kehutanan dilaksanakan melalui 2 Program dan 14 Kegiatan

a). Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup

Urusan wajib bukan bukan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu :

- 1. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan melalui 5 kegiatan diperubahan anggaran tahun 2020 antara lain :
 1. Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup
 2. Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
 3. Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
 4. Kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan
 5. Kegiatan Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan
- 2. Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan melalui 3 Kegiatan antara lain :
 1. Kegiatan Perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup
 2. Kegiatan Pelayanan pengaduan dan penegakan hukum
 3. Peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- 3. Program Tata Kelola Pemerintahan**, yang dilaksanakan melalui 9 Kegiatan di perubahan anggaran Tahun 2020 antara lain :
 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
 2. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
 4. Kegiatan Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran
 5. Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang

6. Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan
7. Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon
8. Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
9. Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten

Adapun Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan/Keluaran masing masing kegiatannya sebagai berikut :

➤ **Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan hidup**

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup

Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Cakupan kegiatannya meliputi : Pemantauan Kualitas Air dan Kerusakan Situ danau, Pemantauan Kualitas Udara Ambient, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Pagu Anggaran Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp 285.410.000,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 283.556.000,- (99,35%) terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp.1.854.000,- Terdiri dari Rp. 1.694.000,- (Sisa Anggaran tidak digunakan) dan Rp. 160.000,- (sisa efisiensi kontrak)

Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai **100%**, dengan Realisasi capaian indikator kinerjanya terdiri dari : Pemantauan Kualitas Air dan Kerusakan Situ danau sebanyak 2 dokumen, Pemantauan Kualitas Udara Ambient sebanyak 1 dokumen, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebanyak 1 dokumen

2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Cakupan sub kegiatannya meliputi : Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Sampah dan Limbah B3, Pengelolaan Sampah, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3

Pagu Anggaran Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 adalah sebesar **Rp. 1.098.697.000,-** Realisasi keuangannya sebesar **Rp. 1.069.828.119,- (97,37%)** terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar **Rp. 28.868.881,-**. (sisa Anggaran tidak digunakan Rp. 24.992.631,- dan efisiensi sisa kontrak pengadaan Rp. 3.876.250,-) Secara fisik Realisasi kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 telah mencapai **100%**, dengan indikator kinerjanya terdiri dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Sampah dan Limbah B3 sebanyak 1 dokumen, Pengelolaan Sampah sebanyak 1 Dokumen, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 sebanyak 1 Dokumen

3. Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup Cakupan sub kegiatannya meliputi : Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Secara Lestari, Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Pengembangan mangrove provinsi Banten, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah

Pagu Anggaran Kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup adalah sebesar **Rp. 225.795.000,-** Realisasi keuangannya sebesar **Rp. 224.455.080,- (99,41%)** terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar **Rp. 1.339.920,-**. (sisa anggaran tidak digunakan Rp. 1.099.920,- dan efisiensi sisa kontrak pengadaan Rp. 240.000,-)

Secara fisik Kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup telah mencapai **100%**, dengan capaian indikator kinerjanya terdiri dari : Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Secara Lestari sebanyak 1 dokumen, Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebanyak 1 dokumen, Pengembangan mangrove provinsi Banten 1 dokumen , Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah 1 dokumen.

4. Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan

Kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan, Cakupan kegiatannya meliputi : Akreditasi/Surveilans dengan target kinerja 30 parameter.

Pagu Anggaran Kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan adalah sebesar **Rp. 137.887.500,-** Realisasi keuangannya sebesar **Rp. 137.386.452,- (99,64%)** terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar **Rp. 501.048,-** (sisa anggaran yang tidak digunakan Rp. 501.048,-)

Secara fisik kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan telah mencapai 100%, dengan indikator capaian kinerja terdiri dari : Akreditasi/Surveilans Laboratorium Lingkungan sebanyak 30 parameter .

5. Pengujian dan Analisa Laboratorium Lingkungan

Kegiatan Pengujian dan Analisa Laboratorium Lingkungan, Cakupan kegiatannya meliputi : a) Pengambilan sampel, pengujian dan Analisa Sampel Internal dengan target kinerja 101 sampel , b) Pelayanan Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal dengan target kinerja 5 sampel.

Pagu Anggaran Kegiatan Pengujian dan Analisa Laboratorium Lingkungan adalah sebesar **Rp 138.920.000,-** Realisasi keuangannya sebesar **Rp. 137.952.000,- (99,30%)** terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar **Rp. 968.000,-**. (sisa anggaran tidak digunakan Rp.659.000,- dan efisiensi sisa kontrak pengadaan Rp.309.000,-)

Secara fisik kegiatan Pengujian dan Analisa Laboratorium Lingkungan telah mencapai 100%, dengan Capaian indikator kinerja mencapai 100%, terdiri dari : a) Pengambilan sampel, pengujian dan Analisa Sampel Internal dengan capaian kinerja 101 sampel , b) Pelayanan Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal dengan capaian kinerja 5 sampel.

➤ Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

1. Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup

Kegiatan Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup, Cakupan kegiatannya meliputi : Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemanfaatan dan Kinerja Pengelolaan Lingkungan, Kajian Lingkungan

Hidup Strategis, Tata Laksana Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan.

Pagu Anggaran Kegiatan Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup adalah sebesar **Rp. 155.400.000,-** Realisasi keuangannya sebesar **Rp. 150.645.000,- (96,94%)** terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar **Rp. 4.755.000,-**. (sisa anggaran yang tidak digunakan Rp. 4.750.000,- dan efisiensi sisa kontrak pengadaan Rp. 5.000,-)

Secara fisik kegiatan Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup telah mencapai **100%**, dengan capaian indikator kinerja nya terdiri dari :, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemanfaatan dan Kinerja Pengelolaan Lingkungan sebanyak 2 dokumen, Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebanyak 1 dokumen Tata Laksana Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan sebanyak 1 dokumen.

2. Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum

Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum, Cakupan sub kegiatannya meliputi : Penanganan Kasus-Kasus Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan target kinerja 1 dokumen , Pengawasan dan Pengendalian Tidak Langsung Terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan dengan target kinerja 1 dokumen.

Pagu Anggaran Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum adalah sebesar **Rp. 135.419.000,-** Realisasi keuangannya sebesar **Rp. 123.359.000,- (91,09%)** terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar **Rp. 12.060.000,-**. (sisa anggaran yang tidak digunakan Rp. 12.060.000,-

Secara fisik kegiatan Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum telah mencapai **100%**, dengan capaian indikator kinerja terdiri dari : Penanganan Kasus-Kasus Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan capaian kinerja 1 dokumen , Pengawasan dan Pengendalian Tidak Langsung Terhadap Ketaatan Pelaku

Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan dengan capaian kinerja 1 dokumen.

3. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup target kinerja sub kegiatannya : Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan 25 lembaga, Pemerhati Lingkungan dan Masyarakat Hukum Adat sebanyak 2 lembaga.

Pagu Anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup adalah sebesar **Rp. 263.010.000,-** Realisasi keuangannya sebesar **Rp. 263.865.100,- (99,94%)** terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar **Rp. 144.900,-**. (sisa anggaran yang tidak digunakan)

Secara fisik kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup telah mencapai 100%, dengan capaian indikator kinerja terdiri dari : Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan 25 lembaga, Pemerhati Lingkungan dan Masyarakat Hukum Adat sebanyak 2 lembaga

➤ Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Kegiatan penyusunan laporan kinerja keuangan dan neraca asset, target capaian kinerjanya meliputi : Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan sebanyak 8 dokumen, Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) sebanyak 2 dokumen dan Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 2 dokumen

Pagu Anggaran kegiatan sebesar **Rp. 24.790.000,-** Realisasi keuangan mencapai sebesar **Rp 24.790.000,- (100%)** tidak terdapat Sisa anggaran yang tidak digunakan.

Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100%, dengan indikator kinerja berupa Dokumen Laporan Keuangan sebanyak 8 dokumen, Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) sebanyak 2 dokumen dan Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 2 dokumen

2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan target kinerja sub kegiatannya meliputi : Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan sebanyak 3 dokumen, Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 10 dokumen , Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 4 dokumen dan Penyediaan data dan informasi pembangunan 5 dokumen

Pagu Anggaran kegiatan sebesar **Rp. 311.190.000,-** Realisasi keuangan mencapai sebesar **Rp. 306.254.900,- (98,41%)** terdapat efisiensi/sisa anggaran tidak digunakan sebesar **Rp. 4.935.100,- ,-. (sisa anggaran tidak digunakan Rp3.305.100,- dan efisiensi sisa kontrak pengadaan Rp. 1.630.000,-)**

Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai **100%**, dengan Capaian indikator kinerja Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan sebanyak 3 dokumen, Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 10 dokumen , Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 4 dokumen dan Penyediaan data dan informasi pembangunan 5 dokumen

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Target Capaian kinerja peningkatan kapasitas aparatur meliputi: Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 1 dokumen, dan Peningkatan Kompetensi Aparatur. 3 dokumen

Pagu Anggaran kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sebesar **Rp. 6.600.000,-** Realisasi keuangan sebesar **Rp6.600.000,- (100%)** tidak terdapat efisiensi/sisa anggaran.

Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai **100%**, dengan indikator kinerja berupa Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 1 dokumen, dan Peningkatan Kompetensi Aparatur 3 dokumen

4. Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

Cakupan Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor meliputi: Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7 kegiatan Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor 1 kegiatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 3 kegiatan, Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah 1 kegiatan
Pagu Anggaran kegiatan sebesar **Rp. 8.290.500,-** Realisasi keuangan sebesar **Rp. 8.167.300.084,- (98,52%)** terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar **Rp. 122.763.416,-**. (anggran tidak digunakan Rp 115.709.916, sisa kontrak pengadaan Rp.7.053.500)

Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100%, dengan indikator capaian indicator kinerja sub kegiatan berupa Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7 kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 kegiatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 3 kegiatan, Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah 1 kegiatan

5. Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang

Target indikator Cakupan kegiatannya meliputi: Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang 6 kegiatan, Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang 1 kegiatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang 3 kegiatan, Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang 1 kegiatan

Pagu Anggaran kegiatan sebesar **Rp. 689.275.000,-** Realisasi keuangan sebesar **Rp. 663.038.848,- (96,19%)** terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar **Rp. 26.236.152,-**. (anggaran tiak digunakan)

Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100%, dengan indicator capaian kinerja berupa Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang 6 kegiatan, Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang 1 kegiatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang 3 kegiatan, Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang 1 kegiatan.

6. Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan

Target Cakupan Kegiatannya meliputi: Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPTD Laboratorium Lingkungan 5 kegiatan, Pengadaan Sarana Prasarana Kantor UPTD Laboratorium Lingkungan 1 kegiatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan 1 kegiatan, Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan 3 kegiatan

Pagu Anggaran kegiatan sebesar **Rp. 870.882.496,-** Realisasi keuangan sebesar **Rp. 862.758.390,- (99,07%)** terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar **Rp. 8.124.106,-**. (Sisa anggaran tidak diserap Rp. 1.985.806,- dan sisa kontrak pengadaan Rp. 6.135.300)

Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai **100%**, dengan Capaian indikator kinerja sub kegiatan berupa Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPTD Laboratorium Lingkungan 5 kegiatan, Pengadaan Sarana Prasarana Kantor UPTD Laboratorium Lingkungan 1 kegiatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan 1 kegiatan, Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan 3 kegiatan.

7. Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

Target Cakupan Kegiatannya meliputi: Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sebanyak 6 kegiatan, Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon 1 kegiatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon 3 kegiatan serta Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon 3 kegiatan

Pagu Anggaran kegiatan sebesar **Rp786.545.004,-** Realisasi keuangan sebesar **Rp.756.181.025,- (96,14%)** terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar **Rp.30.363.979,-**. (Sisa anggaran tidak diserap Rp. 17.962.979,- dan sisa kontrak pengadaan Rp. 12.401.000)

Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai **100%**, dengan Capaian indikator kinerja sub kegiatan berupa Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sebanyak 6 kegiatan, Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon 1 kegiatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon 3 kegiatan serta Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon 3 kegiatan

8. Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan.

Target Cakupan Sub Kegiatannya meliputi: Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan 6 kegiatan, Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan 1 kegiatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan 3 kegiatan, Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan 1 kegiatan

Pagu Anggaran kegiatan sebesar **Rp. 572.880.000,-** Realisasi keuangan sebesar **Rp. 543.037.989,- (94,79%)** terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar **Rp. 29.842.011,-**. (Sisa anggaran tidak diserap Rp. 23.637.263,- dan sisa kontrak pengadaan Rp. 6.204.748)

Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai **100%**, dengan Capaian indikator kinerja sub kegiatan berupa Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan 6 kegiatan, Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan 1 kegiatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan 3 kegiatan, Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan 1 kegiatan

9. Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten.

Target Capaiann Sub Kegiatannya meliputi: Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Taman hutan Raya Banten 6

kegiatan, Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman hutan Raya Banten 1 kegiatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman hutan Raya Banten 3 kegiatan, Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar pada UPTD Pengelolaan Taman hutan Raya Banten 1 kegiatan

Pagu Anggaran kegiatan sebesar **Rp 869.910.000,-** Realisasi keuangan sebesar **Rp. 849.107.800,- (97,61%)** terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar **Rp. 20.802.200,-**. (Sisa anggaran tidak diserap Rp. 1.315.221,- dan sisa kontrak pengadaan Rp.19.486.979)

Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai **100%**, dengan Capaian indikator kinerja sub kegiatan berupa Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Taman hutan Raya Banten 6 kegiatan, Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman hutan Raya Banten 1 kegiatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman hutan Raya Banten 3 kegiatan, Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan pada UPTD Pengelolaan Taman hutan Raya Banten 1 kegiatan

b). Urusan Pilihan Bidang Kehutanan

Urusan Pilihan bidang Kehutanan dilaksanakan melalui 2 (dua) program dan 14 kegiatan yaitu

1. Program Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan , yang dilaksanakan melalui 5 kegiatan diperubahan anggaran tahun 2020 antara lain :

- 1) Kegiatan Perencanaan dan penatagunaan hutan
- 2) Kegiatan Pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan
- 3) Kegiatan Pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan
- 4) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
- 5) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang

2. **Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan**, yang terdiri dari 9 kegiatan antara lain :

- 1) Kegiatan Konservasi SDA dan Ekosistem
- 2) Kegiatan Pengelolaan DAS
- 3) Kegiatan Penyuluhan Kehutanan
- 4) Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang
- 5) Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
- 6) Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan
- 7) Kegiatan Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan
- 8) Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten
- 9) Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten

adapun Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan/Keluaran masing masing kegiatannya sebagai berikut :

➤ **Program Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan**

a. Kegiatan Perencanaan dan penatagunaan hutan

Kegiatan Perencanaan dan Penatagunaan Hutan, Target Capaian Kinerja kegiatannya antara lain : Perencanaan Hutan dengan target kinerja sebanyak 3 dokumen dan Pemantapan Kawasan Hutan dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen

Pagu Anggaran Kegiatan Perencanaan dan Penatagunaan Hutan adalah sebesar **Rp. 282.220.000,-** Realisasi keuangannya sebesar **Rp. 271.215.343,- (96,10%)** terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar **Rp. 11.004.657,-**. (sisa anggaran tidak digunakan Rp.10.629.657,- dan efisiensi sisa kontrak pengadaan Rp.375.000,-)

Secara fisik kegiatan Perencanaan dan Penatagunaan Hutan telah mencapai 100%, dengan capaian indikator kinerjanya antara lain: Perencanaan Hutan sebanyak 3 dokumen, dan Pemantapan Kawasan Hutan sebanyak 2 dokumen

b. Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan

Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan, Target Capaian Kinerja kegiatannya antara lain: Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri sebanyak 1 dokumen dan Penatausahaan Hasil Hutan sebanyak 1 dokumen

Pagu Anggaran Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan adalah sebesar Rp. 393.540.000,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 392.020.000,- (99,61%) terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 1.520.000,- (sisa anggaran tidak digunakan Rp.500.000,- dan efisiensi sisa kontrak pengadaan Rp.1.020.000,-).

Secara fisik kegiatan Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan telah mencapai 100%, dengan capaian indikator kinerjanya antara lain : Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri sebanyak 1 dokumen, dan Penatausahaan Hasil Hutan sebanyak 1 dokumen.

c. Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan

Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha dan promosi Kehutanan, Target Capaian Kinerja kegiatannya antara lain : Pengembangan dan Promosi Aneka Usaha Kehutanan sebanyak 3 komoditas, dan Pengembangan Kawasan Bambu Terpadu sebanyak 1 komoditas.

Pagu Anggaran Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha dan promosi Kehutanan adalah sebesar Rp 321.590.000,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 315.156.400,- (98,00%), terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 6.433.600,- ,-(sisa anggaran tidak digunakan)

Secara fisik kegiatan Pengembangan Aneka Usaha dan promosi Kehutanan telah mencapai 100%, dengan capaian indikator kinerjanya antara lain : Pengembangan dan Promosi Aneka Usaha Kehutanan sebanyak 3 komoditas, dan Pengembangan Kawasan Bambu Terpadu sebanyak 1 komoditas.

d. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon

Kegiatan Pengawasan dan pengendalian sumberdaya hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon Target Capaian Kinerja kegiatannya antara lain : Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi sebanyak 1 dokumen, Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan sebanyak 1 dokumen dan Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebanyak 1 dokumen .

Pagu Anggaran Kegiatan Pengawasan dan pengendalian sumberdaya hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon adalah sebesar Rp 48.200.000,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 47.905.000,- (99,39%) terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 295.000,- (efisiensi sisa kontrak pengadaan)

Secara fisik kegiatan Pengawasan dan pengendalian sumberdaya hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon telah mencapai 100%, dengan capaian indikator kinerjanya antara lain : Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi sebanyak 1 dokumen, Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan sebanyak 1 dokumen dan Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebanyak 1 dokumen .

e. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang Target Capaian Kinerja kegiatannya antara lain : Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi sebanyak 1 dokumen dan Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebanyak 1 dokumen

Pagu Anggaran Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang adalah

sebesar Rp. 23.410.000,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 23.310.000,- (99,57%) terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 100.000,-(Sisa anggaran tidak digunakan)

Secara fisik kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang telah mencapai 100%, dengan capaian indikator kinerjanya antara lain : Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi sebanyak 1 dokumen dan Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebanyak 1 dokumen

➤ **Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan**

1). Kegiatan Konservasi SDA dan Ekosistem

Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Target Capaian Kinerja kegiatannya antara lain : Pengendalian penangkar tumbuhan dan satwa liar sebanyak 0 dokumen, Penanganan Daerah penyangga kawasan konservasi dan Lembaga Konservasi sebanyak 2 dokumen, Perencanaan Pengolahan data dan Infomasi kebakaran hutan lahan, Kawasan Konservasi dan ekosistem esensial sebanyak 1 dokumen dan Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten dan Lembaga Konservasi ex-situ sebanyak 1 dokumen

Pagu Anggaran Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem adalah sebesar Rp. 401.747.000,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 394.452.150,- (98,18%) terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 7.294.850,-. (sisa anggaran tidak digunakan Rp.4.374.700,- dan efisiensi sisa kontrak pengadaan Rp.2.920.150,-)

Secara fisik kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem telah mencapai 100%, dengan capaian indikator kinerjanya antara lain : Pengendalian penangkar tumbuhan dan satwa liar sebanyak 0 dokumen, Penanganan Daerah penyangga kawasan konservasi dan Lembaga Konservasi sebanyak 2 dokumen, Perencanaan Pengolahan data dan Infomasi kebakaran hutan lahan, Kawasan Konservasi dan ekosistem

esensial sebanyak 1 dokumen dan Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten dan Lembaga Konservasi ex-situ sebanyak 1 dokumen

2) Pengelolaan DAS

Kegiatan Pengelolaan DAS Target Capaian Kinerja kegiatannya antara lain : Penyusunan Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Hutan Lahan dan Monev RHL sebanyak 2 dokumen, Pengembangan kelembagaan dan peningkatan fungsi DAS sebanyak 1 dokumen.

Pagu Anggaran Kegiatan Pengelolaan DAS adalah sebesar Rp. 520.079.000,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 504.159.080,- (96,94%) terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 15.919.920,-. (sisa anggaran tidak digunakan sebesar Rp. 6.508.670,- dan sisa kontrak pengadaan Rp. 9.411.250,-)

Secara fisik kegiatan Pengelolaan DAS telah mencapai 100%, dengan Capaian Kinerja kegiatannya antara lain : Penyusunan Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Hutan Lahan dan Monev RHL sebanyak 2 dokumen, Pengembangan kelembagaan dan peningkatan fungsi DAS sebanyak 1 dokumen.

3) Penyuluhan Kehutanan

Kegiatan Penyuluhan Kehutanan **Target** Capaian Kinerja kegiatannya antara lain : Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan sebanyak 2 kelompok, Pengembangan Kelembagaan data dan informasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH) sebanyak 10 Kelompok, Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial sebanyak 3 Kelompok.

Pagu Anggaran Kegiatan Penyuluhan Kehutanan adalah sebesar Rp. 266.670.000,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 265.368.000,- (99,47%) terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 1.402.000,-. (sisa anggaran tidak digunakan sebesar Rp. 652.000,- dan sisa kontrak pengadaan Rp. 750.000,-)

Secara fisik kegiatan Penyuluhan Kehutanan telah mencapai 100%, dengan **Capaian Kinerja** kegiatannya antara lain : Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan sebanyak 2 kelompok, Pengembangan

Kelembagaan data dan informasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH) sebanyak 10 Kelompok, Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial sebanyak 3 Kelompok.

4) Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang

Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang, Target Capaian Kinerja kegiatannya antara lain : Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sebanyak 2.500 Ha

Pagu Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang adalah sebesar Rp. 1.045.468.000,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.040.555.540,- (99,53%) terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 4.912.460,- (sisa anggaran tidak digunakan Rp.651.210,- dan efisiensi sisa kontrak pengadaan Rp.4.261.250,-)

Secara fisik kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang telah mencapai 134,32%, dengan **Capaian Kinerja** kegiatannya antara lain : Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sebanyak **3.358,01 Ha**

5). Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon **Target** Capaian Kinerja kegiatannya antara lain : Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial seluas 2.500 Ha

Pagu Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon adalah sebesar Rp. 720.854.000,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 716.302.000,- (99,37%) terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 4.552.000,- (sisa anggaran tidak

digunakan Rp.4.482.000,- dan efisiensi sisa kontrak pengadaan Rp.70.000,-)

Secara fisik kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon telah mencapai 101,72%, dengan **Capaian Kinerja** kegiatannya antara lain : Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sebanyak **2.542,88 Ha**

f. Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan

Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan **Target** Capaian Kinerja kegiatannya antara lain : Penyediaan bibit tanaman hutan dan produktif sebanyak 160.000 batang, Pengembangan Tanaman Hutan dan Produktif sebanyak 100 batang

Pagu Anggaran Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan adalah sebesar Rp. 887.413.500,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 881.010.967,- (99,28%) terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 6.402.533,- (sisa anggaran tidak digunakan Rp.4.839.383,- dan efisiensi sisa kontrak pengadaan Rp.1.563.150,-)

Secara fisik kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan telah mencapai 100%, dengan **Capaian Kinerja** kegiatannya antara lain : Penyediaan bibit tanaman hutan dan produktif sebanyak 180.010 batang, Pengembangan Tanaman Hutan dan Produktif sebanyak 100 batang

g. Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan

Kegiatan Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan **Target** Capaian Kinerja kegiatannya antara lain : Pengendalian pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan sebanyak 1 dokumen, Pengawasan benih tanaman hutan sebanyak 1 dokumen, Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS sebanyak 1 dokumen dan Pemeliharaan Arboreteum/ kebun koleksi sebanyak 1 dokumen

Pagu Anggaran Kegiatan Sertifikasi dan **Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan** adalah sebesar Rp. 174.461.000,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 169.030.000,- (96,89%) terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 5.431.000,-

Secara fisik kegiatan Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan telah mencapai 100%, dengan **Capaian Kinerja** kegiatannya antara lain : Pengendalian pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan sebanyak 1 dokumen, Pengawasan benih tanaman hutan sebanyak 1 dokumen, Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS sebanyak 1 dokumen dan Pemeliharaan Arboreteum/ kebun koleksi sebanyak 1 dokumen

h. Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan TAHURA Banten

Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan TAHURA Banten **Target** Capaian Kinerja kegiatannya antara lain : Perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA seluas 1.595,9 Hektar, Reboisasi dan Rehabilitasi lahan serta pengawetan keanekaragaman hayati seluas 12,5 Ha

Pagu Anggaran Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan TAHURA Banten adalah sebesar Rp. 375.579.000,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 372.714.000,- (99,24%) terdapat efisiensi/sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 2.865.000,- (sisa anggaran tidak digunakan Rp.200.000,- dan efisiensi sisa kontrak pengadaan Rp.2.665.000,-)

Secara fisik kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan TAHURA Banten telah mencapai 100%, dengan **Capaian Kinerja** kegiatannya antara lain : Perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA seluas 1.595,9 Hektar, Reboisasi dan Rehabilitasi lahan serta pengawetan keanekaragaman hayati seluas 12,5 Ha

i. Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan TAHURA

Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan TAHURA Banten **Target** Capaian Kinerja kegiatannya antara lain : Pengembangan Kawasan TAHURA Banten sebanyak 2 dokumen dan Pemanfaatan Kawasan Tahura Banten sebanyak 2 dokumen

Pagu Anggaran Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan TAHURA Banten adalah sebesar Rp. 701.938.000,- Realisasi keuangannya sebesar Rp. 646.129.300,- (92,05%) terdapat efisiensi/sisa anggaran

yang tidak digunakan sebesar Rp. 55.808.700,- (sisanya anggaran tidak digunakan Rp.47.232.200,- dan efisiensi sisa kontrak pengadaan Rp.8.876.500,-)

Secara fisik kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan TAHURA Banten telah mencapai 100%, **Capaian Kinerja** kegiatannya antara lain : Pengembangan Kawasan TAHURA Banten sebanyak 2 dokumen dan Pemanfaatan Kawasan Tahura Banten sebanyak 2 dokumen

D. Permasalahan dan Solusi

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tentunya terdapat kendala dan hambatan yang harus dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam merealisasikan capaian kinerjanya. Adapun Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pilihan Kehutanan adalah sebagai berikut :

a) Permasalahan

▪ Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Dampak adanya Pandemi Covid-19 beberapa kegiatan Bidang Lingkungan Hidup terkendala dalam pelaksanaan kegiatannya antara lain :
 - a. Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengalami refofusing anggaran, hal ini menyebabkan beberapa tolok ukur kegiatan harus menyesuaikan pelaksanaan kegiatannya baik dari aspek anggaran maupun teknis pelaksanaan kegiatannya, seperti : a) tolok ukur Penyusunan dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan dan tata laksana pengendalian pencemaran air tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020 dan pada perubahan anggaran 2020 tidak dianggarkan. b) Pemantauan kualitas udara ambien, dengan target terpantaunya kualitas udara ambien di 8 Kab/Kota, masing-masing Kab/Kota sebanyak 4 titik, 2 kali (tahap) pemantauan, tahun 2020 ini hanya bisa dilaksanakan 1 kali (tahap). Hal ini akan menyulitkan dalam penghitungan Indeks Kualitas Udara (IKU).

- b. Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup , adanya pengurangan anggaran dalam masa pandemic covid 19 sehingga beberapa tolok ukur belum dapat dilaksanakan secara optimal dan berdampak dalam penyelesaian kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan GRK Sektor Limbah yaitu kurangnya koordinasi antar kabupaten/kota terkait serta minimnya data pencapaian GRK sektor limbah dari kabupaten/kota karena belum terbentuknya Tim PEP RAD GRK tingkat Kab/Kota.
 - c. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan, Adanya pandemi covid 19 menyebabkan dilaksanakan refocusing anggaran serta pergeseran dan perubahan anggaran sehingga perlu penyesuaian pelaksanaan kegiatan pada seluruh kegiatan Dinas LHK sesuai anggaran yang tersedia
- 2) Jumlah dan kualitas SDM bidang lingkungan yang masih terbatas dalam pelaksanaan beberapa kegiatan khususnya penanganan kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - 3) - Pada Tolok ukur Penilaian Kota Berwawasan lingkungan Penyerapan anggaran dilaksanakan sebelum refocusing dan perubahan anggaran(awal Triwulan I) dalam rangka rapat persiapan penilaian kota berwawasan lingkungan dan perjalanan dinas ke KLHK sedangkan karena adanya pandemic covid 19 Pemantauan fisik terhadap kota berwawasan lingkungan (Kota Adipura) tidak dilaksanakan oleh KLHK (ditiadakan).
 - Pembinaan sekolah adiwiyata secara berjenjang tingkat wilayah Kab/Kota dan Provinsi terkendala oleh kewenangan /khususnya terhadap sekolah SLTA /SMK yang pembinaan nya tidak dapat dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Kab/Kota tetapi langsung pada tingkat provinsi)
 - 4) Masih adanya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak tepat waktu (tidak sesuai dengan waktu perencanaan) sehingga masih terdapat kegiatan yang mengalami sedikit keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatannya.

- 5) Masih minimnya SDM pada UPTD dan Cabang Dinas yang menangani admistrasi, perencanaan dan petugas teknis sehingga beberapa kegiatan mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.

▪ **Bidang Kehutanan**

- 1). Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan khususnya di UPTD/CDLHK (kendaraan dinas yang sesuai dengan medan yang berat /kondisi lapangan yang berat)
- 2). Dampak Pandemic Covid 19, pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Kehutanan menyesuaikan dengan kondisi pandemic covid 19 sebagian besar dilaksanakan melalui mekanisme daring/virtual, namun tidak semua KTH (kelompok Tani Hutan)/Penyuluh dilapangan menguasai teknologi informasi/Komunikasi (gadget) serta lemahnya sinyal di beberapa lokasi (lapangan) sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat.
- 3). Terbatasnya SDM kehutanan khususnya Penyuluh Kehutanan sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan kehutanan di Provinsi Banten dari tahun ketahun semakin berkurang jumlahnya, seiring dengan banyaknya ASN penyuluh kehutanan yang memasuki usia pensiun, dan terbatasnya penambahan formasi penyuluh kehutanan, sampai dengan tahun 2020 jumlah penyuluh kehutanan ASN di Provinsi Banten tinggal berjumlah 7 Orang di tiga wilayah kabupaten di Provinsi Banten (Kabupaten Lebak sebanyak 1 orang, Kabupaten Pandeglang 4 orang dan Kabupaten Serang 2 orang)
- 4). Pada Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan terdapat hambatan antara lain :
 - a. Kondisi iklim tidak hanya berpengaruh pada proses pengadaan benih namun juga berpengaruh terhadap jadwal dan jumlah benih yang disemai Jadwal penyemaian terpaksa mundur bulan seharusnya dengan jumlah benih yang disemai disesuaikan dengan kondisi cuaca dan adanya gangguan hewan dan hama sangat mengganggu kondisi tanaman/bibit dipersemaian .

- b. Dampak Pandemic Covid 19 berdampak pengurangan pagu anggaran dengan mengurangi/menghilangkan kegiatan kegiatan penunjang dalam pengelolaan perbenihan (Bimtek, Workshop, pelatihan-pelatihan teknis) dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan perbenihan secara umum.
 - c. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Kegiatan secara efektif dan efisien dengan lebih memprioritaskan kegiatan kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan terkait dampak pandemic covid 19 antara lain pemberdayaan masyarakat yang bersifat pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, swakelola dan padat karya.
- 5). Terbatasnya SDM baik teknis maupun administrasi pada UPTD Tahura Banten khususnya dalam upaya peningkatan fungsi Taman Hutan Raya seluas 1.595,9 Ha serta belum adanya tenaga Fungsional Polisi Hutan yang bertugas dalam perlindungan dan pengawasan kawasan hutan Taman Hutan Raya Banten
- 6). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan adalah sebagai berikut :
- a) Belum adanya sinergitas program dan kegiatan antar SKPD baik di tingkat Provinsi Banten maupun SKPD di tingkat Kabupaten/Kota serta kerjasama yang berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b) Masih lemahnya sumberdaya manusia dan kelembagaan serta kurangnya informasi pasar serta masih kendala pemasaran dikarenakan hasil-hasil produksi bidang kehutanan masih banyak yang belum memenuhi syarat untuk dipasarkan secara luas sehingga perlu dilakukan pembinaan yang berkelanjutan kepada kelompok;
 - c) Bentuk kegiatan dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan HHBK dimulai dari sektor hulu berupa budidaya hasil hutan bukan kayu dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku kegiatan sampai dengan sektor industri hilir;

- d) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten belum memiliki data yang valid jumlah kelompok-kelompok pembudidaya HHBK belum tersedianya informasi data klasifikasi kelompok tani, sehingga pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan kepada kelompok tani berdasarkan kelas kelompok;
- e) Petani/kelompok pembudidaya HHBK masih belum memperhatikan standar, mutu/ kualitas hasil produksi;
- f) Masih adanya anggapan walau produknya tidak memiliki kualitas yang baik tetapi masih akan tetap laku terjual sehingga potensi pemasaran produk HHBK belum dimanfaatkan dengan baik;
- g) Konsumsi produk-produk HHBK yang masih di bawah potensi produksinya dan belum membudaya di masyarakat;
- h) Terbatasnya kerjasama petani/kelompok pembudidaya sebagai produsen dengan industri pengolahan dan Kelembagaan petani dan kelembagaan usaha belum mampu mendorong petani untuk memanfaatkan peluang usaha di bidang industri hilir;
- i) Kurangnya insentif harga bagi petani sesuai mutu yang dihasilkan;

b) Solusi/Tindaklanjut

▪ Bidang Lingkungan Hidup

- 1). a. Penyusunan dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan diusulkan kembali untuk dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021 bersamaan dengan penyusunan rencana aksi pengendalian pencemaran sungai. b) Untuk penghitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2020, dibantu dan dijadikan Referensi juga hasil penghitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang dilaksanakan oleh KLHK tahun 2020 di 8 Kab/Kota di Provinsi Banten dan untuk pelaksanaan pengukuran IKU pada tahun 2021 diusulkan untuk tetap dianggarkan agar bisa melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien sebanyak 2 tahap.
- b. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Anggaran yang tersedia dengan memperhatikan protokol kesehatan serta mengoptimalkan teknologi informasi/komunikasi yang ada dalam rangka

- koordinasi dan pemenuhan data serta untuk segera memfasilitasi dan mendorong pembentukan Tim RAD GRK Tingkat Kabupaten dan Kota
- 2). Melaksanakan upaya peningkatan kuantitas SDM dan mengoptimalkan SDM yang ada sesuai kapasitas teknisnya serta mengikutsertakan/mengirim SDM yang ada untuk mengikuti diklat diklat teknis terkait.
 - 3). - Koordinasi dengan KLHK terkait penilaian kota Adipura selanjutnya.
- Solusi yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten agar kegiatan pembinaan untuk tingkat SLTA dan SMK dapat tetap bisa dijalankan serta koordinas dengan stkaeholder tingkat kabupaten/kota
 - 4). Proses persiapan yang lebih baik lagi dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaannya serta peningkatan koordinasi dengan pelaksana kegiatan (pihak ketiga) kepada para pelaksana teknis kegiatan kedepan perlu memperhatikan dan mengacu pada Rencana Operasional Kegiatan atau (ROK) yang telah dibuat
 - 5). Melaksanakan/mengusulkan tambahan tenaga Perencanaan dan admisntrasi serta tenaga teknis di UPTD dan Cabang Dinas Liingkungan Hidup dan Kehutanan

▪ **Bidang Kehutanan**

- 1). Perlunya daya dukung saran prasarana penunjang kegiatan dilapangan khususnya kendaraan dinas yang dapat digunakan pada medan lapangan yang cukup berat mengingat kondisi lapangan di wilayah Provinsi Banten masih banyak yang cukup berat dengan mengusulkan anggaran pengadaan kendaraan operasionan pada tahun 2021
- 2). Optimalisasi kegiatan melalui media daring dan untuk kegiatan kegiatan yang harus melaksanakan secara luring menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku yang di perintahkan oleh pemerintah.
- 3). Melaksanakan upaya perencanaan pengadaan penyuluh kehutanan dan perencanaan proses impasing penyuluh kehutanan serta optimalisasi

penyuluh kehutanan swadaya (pksm) di Provinsi Banten dalam rangka menunjang tupoksi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- 4). a. Untuk mengatasi kendala dan hambatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutan diatas telah dilakukan perubahan jadwal kegiatan danantisipasi terjadinya perubahan iklim yang drastis di tahun mendatang dengan berkoordinasi dengan kantor BMKG terdekat. Adanya gangguan ternak serta hama dilaksanakan kegiatan pengendalian terpadu antara lain berkoordinasi dengan para pemilik ternak, merubah posisi paranet dan melakukan penyungkupan pada bedeng semai serta penggunaan bahan kimia untuk mengedalikan belalang dan lintah tanah
- b. Untuk peningkatan kompetensi SDM, kegiatan langsung dilapangan masih sangat diperlukan dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. . Kiranya di tahun 2021 dapat memperoleh anggaran yang cukup untuk dapat melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pelaku perbenihan. Di tahun 2020 dengan adanya recofusing anggaran, dalam rangka peningkatan SDM lebih banyak dilaksanakan secara on line untuk mendapatkan bahan-bahan mengenai pembibitan dan pengembangannya.
- 5). Mengusulkan kebutuhan tenaga teknis dan adminisitrasi pada UPTD Tahura serta telah mengusulkan kebutuhan tenaga fungsional Polisi Kehutanan serta telah membuat Anjab dan ABK Pejabat Fungsional Polhut yang telah disampaikan ke BKD dan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Banten.
- 6). Untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya dengan :
 1. Meningkatkan koordinasi dan melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan SKPD lintas sektor baik dengan SKPD Provinsi Banten maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Banten;
 2. Memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas baik aparatur maupun kelompok-kelompok pembudidaya HHBK agar semakin kuatnya sumberdaya manusia dan kelembagaan kelompok;
 3. Melakukan validasi data kelompok-kelompok pembudidaya dengan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

4. Menyosialisasikan standar mutu hasil produksi HHBK secara berkelanjutan;
5. Melakukan kegiatan-kegiatan temu usaha untuk membuka peluang-peluang pemasaran hasil produksi HHBK;
6. Berupaya untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produk-produk HHBK;

Melaksanakan sosialisasi kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan HHBK;

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Semester I Tahun 2021

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja output pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sampai dengan akhir bulan Juni 2021 dapat berjalan dengan baik, walaupun dalam pelaksanaannya terkendala dengan adanya wabah pandemic Covid-19. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sampai dengan akhir Juni 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Pagu APBD Murni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 55.900.021.240,- dan Target Belanja Pendapatan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium Lingkungan dan ruangan) sebesar Rp.190.000.000,-.

Sebelum perubahan anggaran Tahun 2021 telah terjadi **refocusing anggaran** (pergeseran anggaran APBD) dalam rangka penanganan Covid-19 tahun 2021 dan terjadi pengurangan pagu sebesar **Rp. 868.856.000,-** sehingga totalnya pagu APBD menjadi Rp. 55.031.165.240,-

Realisasi pendapatan sampai dengan akhir bulan Juni 2021 (Semester I/Triwulan II) Tahun 2021 realisasi sebesar Rp. 40.294.500 atau sebesar 21,21% , Realisasi Belanja sebesar Rp. 25.875.631.730,- atau sebesar 47,02% dan Adapun Rekapitulasi capaian realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II /Semester I Tahun 2021 serta evaluasi capaian Output dan Outcomes sebagaimana tabel tabel berikut ini :

Tabel.2.8 Realisasi Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Triwulan II/Semester 1 Tahun 2021

Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur	Kode Rekening	Pagu Anggaran	Bobot (%)	Realisasi Fisik (%)		Realisasi Keuangan (Rp.)			Sisa Anggaran	Contra Post	Ket.
		(Rp.)		Tertimbang Fisik	Tertimbang Kegiatan	SP2D s/d Bulan Laporan	SPJ s/d Bulan Laporan	(%) (9):(4)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		190.000.000	100	21,21	21,21	40.294.500	40.294.500	21,21	149.705.500		
- Retribusi Pemakaian Laboratorium	4 1 02 02 01 0004	179.200.000	94,32	21,23	20,02	38.044.500,00	38.044.500,00	21,23	141.155.500		
Retribusi Pemakaian Ruangan	4 1 02 02 01 0005	10.800.000	5,68	20,83		2.250.000,00	2.250.000,00	20,83	8.550.000		
Jumlah Total		190.000.000	100	21,21	21,21	40.294.500	40.294.500	21,21	149.705.500		

Tabel 2.9 Capaian Realisasi Keuangan Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Triwulan II/Juni Tahun 2021

No.	Kegiatan	Target Kinerja	Sasaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi				Sisa Anggaran		Permasalahan/ kendala
			Nama Klpk	Lokasi				Tertimbang/Kegiatan (%)	Tertimbangan/ Instansi (7)×(9)	Keuangan	(%)	(Rp.)	(%)	
											(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				27.920.763.980	50,736	61,6	61,60	31,25	17.197.816.036	61,60	10.722.947.944	38,40	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan		Kota Serang	26.891.719.980	48,866		62,90	30,74	16.915.601.036	62,90	9.976.118.944	37,10	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		Kota Serang	986.044.000	1,7918		26,45	0,47	260.815.000	26,45	725.229.000	73,55	
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		Kota Serang	7.000.000	0,0127		100,00	0,01	7.000.000	100,00	-	0,00	
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		Kota Serang	7.000.000	0,0127		49,29	0,01	3.450.000	49,29	3.550.000	50,71	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen		Kota Serang	7.000.000	0,0127		0,00	0,00	3.450.000	49,29	3.550.000	50,71	
6.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12 Bulan		Kota Serang	7.000.000	0,0127		0,00	0,00	-	0,00	7.000.000	100,00	
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	1 Dokumen		Kota Serang	8.000.000	0,0145		50,00	0,01	4.000.000	50,00	4.000.000	50,00	
8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		Kota Serang	7.000.000	0,0127		50,00	0,01	3.500.000	50,00	3.500.000	50,00	
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				400.000.000	0,7269	33,23	30,23	0,22	88.916.500	22,23	311.083.500	77,77	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		Kota Serang	100.000.000	0,1817		54,28	0,10	54.276.500	54,28	45.723.500	45,72	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		Kota Serang	10.000.000	0,0182		0,00	0,00	-	0,00	10.000.000	100,00	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Kota Serang	10.000.000	0,0182		0,00	0,00	-	0,00	10.000.000	100,00	
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen		Kota Serang	10.000.000	0,0182		0,00	0,00	-	0,00	10.000.000	100,00	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		Kota Serang	10.000.000	0,0182		0,00	0,00	-	0,00	10.000.000	100,00	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 dokumen		Kota Serang	140.000.000	0,2544		13,33	0,03	18.660.000	13,33	121.340.000	86,67	
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen		Kota Serang	120.000.000	0,2181		13,32	0,03	15.980.000	13,32	104.020.000	86,68	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				36.000.000	0,0654	50,67	47,67	0,03	15.000.000	41,67	21.000.000	58,33	
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan		Kota Serang	36.000.000	0,0654		27,78	0,02	15.000.000	41,67	21.000.000	58,33	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				144.800.000	0,2631	87,01	85,01	0,22	118.750.000	82,01	26.050.000	17,99	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	245 Set		Kota Serang	119.800.000	0,2177		98,41	0,21	117.900.000	98,41	1.900.000	1,59	
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Bulan		Kota Serang	25.000.000	0,0454		3,40	0,00	850.000	3,40	24.150.000	96,60	

5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					467.195.000	0,849	47,76	45,76	0,39	187.488.000	40,13	279.707.000	59,87
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Kota Serang		25.350.000	0,0461		59,79	0,03	15.158.000	59,79	10.192.000	40,21
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kota Serang		134.225.000	0,2439		48,29	0,12	64.817.000	48,29	69.408.000	51,71
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Kota Serang		98.164.000	0,1784		24,47	0,04	24.024.000	24,47	74.140.000	75,53
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	Kota Serang		67.000.000	0,1217		49,56	0,06	33.202.000	49,56	33.798.000	50,44
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Kota Serang		60.000.000	0,109		27,96	0,03	16.778.000	27,96	43.222.000	72,04
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Kota Serang		77.456.000	0,1407		36,81	0,05	28.509.000	36,81	48.947.000	63,19
	7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Serang		5.000.000	0,0091		100,00	0,01	5.000.000	100,00	-	0,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					121.430.000	0,2207	60,28	55,28	0,12	67.125.000	55,28	54.305.000	44,72
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Bulan	Kota Serang		83.430.000	0,1516		53,94	0,08	45.000.000	53,94	38.430.000	46,06
	2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	6 Bulan	Kota Serang		38.000.000	0,0691		58,22	0,04	22.125.000	58,22	15.875.000	41,78
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.895.701.000	12,531	53,78	51,78	6,49	3.299.053.784	47,84	3.596.647.216	52,16
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kota Serang		522.042.456	0,9486		40,10	0,38	209.330.376	40,10	312.712.080	59,90
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Kota Serang		6.373.658.544	11,582		48,48	5,61	3.089.723.408	48,48	3.283.935.136	51,52
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					457.410.000	0,8312	36	35,76	0,30	160.897.600	35,18	296.512.400	64,82
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peror	12 Bulan	Kota Serang		73.500.000	0,1336		0,00	0,00	51.902.100	70,62	21.597.900	29,38
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenda	12 Bulan	Kota Serang		216.750.000	0,3939		18,94	0,07	50.855.500	23,46	165.894.500	76,54
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	12 Bulan	Kota Serang		133.000.000	0,2417		25,00	0,06	33.250.000	25,00	99.750.000	75,00
	4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	12 Bulan	Kota Serang		34.160.000	0,0621		66,60	0,04	24.890.000	72,86	9.270.000	27,14
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK LT					102.430.000	0,19	35,41	33,47	0,06	29.971.040	29,26	72.458.960	70,74
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	Kota Serang		2.100.000	0,0		0,00	0,00	-	0,00	2.100.000	100,00
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	Kota Serang		15.476.000	0,0281		43,93	0,01	6.799.000	43,93	8.677.000	56,07
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	Kota Serang		56.094.000	0,1019		0,00	0,00	13.154.800	23,45	42.939.200	76,55
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	Kota Serang		9.060.000	0,0165		0,00	0,00	4.456.200	49,19	4.603.800	50,81
	5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	Kota Serang		4.700.000	0,0		0,00	0,00	1.920.000	40,85	2.780.000	59,15
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	Kota Serang		15.000.000	0,0273		24,27	0,01	3.641.040	24,27	11.358.960	75,73

10.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah CDLHK LT			5.000.000	0,0	9	0,00	0,00	-	0,00	5.000.000	100,00	
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	Kota Serang	5.000.000	0,0		0,00	0,00	-	0,00	5.000.000	100,00	
11.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK LT			194.600.000	0,3536	43,64	39,64	0,14	15.696.600	8,07	178.903.400	91,93	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kota Serang	39.600.000	0,072		39,64	0,03	15.696.600	39,64	23.903.400	60,36	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	Kota Serang	155.000.000	0,2817		0,00	0,00	-	0,00	155.000.000	100,00	
12.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK LT			66.900.000	0,1216	70,88	65,88	0,08	20.793.000	31,08	46.107.000	68,92	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	12 bulan	Kota Serang	51.000.000	0,0927		29,40	0,03	14.993.000	29,40	36.007.000	70,60	
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	12 bulan	Kota Serang	15.900.000	0,0289		36,48	0,01	5.800.000	36,48	10.100.000	63,52	
13.	Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK PSC			125.040.000	0,2272	75,12	73,12	0,17	85.369.000	68,27	39.671.000	31,73	
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Bulan	Kota Serang	8.040.000	0,0146		97,51	0,01	7.840.000	97,51	200.000	2,49	
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	Kota Serang	69.600.000	0,1265		76,00	0,10	52.899.000	76,00	16.701.000	24,00	
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	Kota Serang	24.100.000	0,0438		48,76	0,02	11.750.000	48,76	12.350.000	51,24	
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	Kota Serang	8.300.000	0,0151		49,16	0,01	4.080.000	49,16	4.220.000	50,84	
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	Kota Serang	15.000.000	0,0273		58,67	0,02	8.800.000	58,67	6.200.000	41,33	
14.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah CDLHK PSC			40.000.000	0,0727	37,2	35,20	0,03	9.000.000	22,50	31.000.000	77,50	
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	Kota Serang	40.000.000	0,0727		22,50	0,02	9.000.000	22,50	31.000.000	77,50	
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK PSC			47.000.000	0,0854	28,12	26,12	0,02	11.084.180	23,58	35.915.820	76,42	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Kota Serang	47.000.000	0,0854		23,58	0,02	11.084.180	23,58	35.915.820	76,42	
16.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK PSC			61.960.000	0,1126	79,1	77,10	0,09	45.667.000	73,70	16.293.000	26,30	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	12 bulan	Kota Serang	43.960.000	0,0799		71,24	0,06	31.317.000	71,24	12.643.000	28,76	
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	12 bulan	Kota Serang	18.000.000	0,0327		79,72	0,03	14.350.000	79,72	3.650.000	20,28	
17.	Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Lab. Lingkungan			390.962.000	0,7104	92,36	90,13	0,64	337.624.060	86,36	53.337.940	13,64	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	Kota Serang	2.425.000	0,0044		0,00	0,00	-	0,00	2.425.000	100,00	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	Kota Serang	20.372.500	0,037		99,98	0,04	20.368.000	99,98	4.500	0,02	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	Kota Serang	303.902.000	0,5522		92,21	0,51	280.225.000	92,21	23.677.000	7,79	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	Kota Serang	1.202.500	0,0022		0,00	0,00	-	0,00	1.202.500	100,00	
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	Kota Serang	63.060.000	0,1146		58,72	0,07	37.031.060	58,72	26.028.940	41,28	

18.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Lab. Lingkungan				27.205.000	0,0494	93,57	91,57	0,05	23.669.000	87,00	3.536.000	13,00	
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	Kota Serang	27.205.000	0,0494		87,00	0,04	23.669.000	87,00	3.536.000	13,00	
19.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Lab. Lingkungan				370.200.000	0,6727	43,87	40,87	0,27	127.644.000	34,48	242.556.000	65,52	
	1.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	Kota Serang	370.200.000	0,6727		34,48	0,23	127.644.000	34,48	242.556.000	65,52	
20.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Lab. Lingkungan				242.400.000	0,4405	18,57	15,57	0,07	26.259.300	10,83	216.140.700	89,17	
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	12 Bulan	Kota Serang	120.900.000	0,2197		18,19	0,04	21.989.300	18,19	98.910.700	81,81	
	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	12 Bulan	Kota Serang	121.500.000	0,2208		3,51	0,01	4.270.000	3,51	117.230.000	96,49	
21.	Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD SPTH				80.155.000	0,1457	50,77	47,77	0,07	34.194.000	42,66	45.961.000	57,34	
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Bulan	Kota Serang	2.092.000	0,0038		99,90	0,00	2.090.000	99,90	2.000	0,10	
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Bulan	Kota Serang	20.240.000	0,0368		54,39	0,02	11.009.000	54,39	9.231.000	45,61	
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Kota Serang	31.675.000	0,0576		37,83	0,02	11.983.000	37,83	19.692.000	62,17	
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	Kota Serang	8.440.000	0,0153		42,59	0,01	3.595.000	42,59	4.845.000	57,41	
	5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Kota Serang	2.708.000	0,0049		41,84	0,00	1.133.000	41,84	1.575.000	58,16	
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Kota Serang	15.000.000	0,0273		29,23	0,01	4.384.000	29,23	10.616.000	70,77	
22.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH				22.500.000	0,0409	88	82,22	0,03	17.823.400	79,22	4.676.600	20,78	
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Bulan	Kota Serang	22.500.000	0,0409		79,22	0,03	17.823.400	79,22	4.676.600	20,78	
23.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH				125.060.000	0,2273	52,24	49,24	0,11	55.123.978	44,08	69.936.022	55,92	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kota Serang	56.400.000	0,1025		14,70	0,02	18.383.978	32,60	38.016.022	67,40	
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan 34 Bulan	Kota Serang	68.660.000	0,1248		29,38	0,04	36.740.000	53,51	31.920.000	46,49	
24.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH				81.640.000	0,1484	37,17	35,17	0,05	24.190.000	29,63	57.450.000	70,37	
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	12 Bulan	Kota Serang	48.140.000	0,09		17,82	0,02	14.550.000	30,22	33.590.000	69,78	
	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	Kota Serang	33.500.000	0,06		11,81	0,01	9.640.000	28,78	23.860.000	71,22	
25.	Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA				101.840.000	0,1851	57,4	55,40	0,10	50.837.500	49,92	51.002.500	50,08	
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Bulan	Provinsi Banten	1.001.000	0,0018		0,98	0,00	1.001.000	100,00	-	0,00	
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Bulan	Provinsi Banten	14.919.000	0,0271		14,65	0,00	1.001.000	6,71	-	0,00	

3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12 Bulan		Provinsi Banten	5.947.000	0,0108		5,84	0,00	14.919.000	250,87	-	0,00	
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan		Provinsi Banten	6.540.000	0,0119		4,57	0,00	4.024.000	61,53	-	0,00	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Bulan		Provinsi Banten	2.420.000	0,0044		1,11	0,00	2.998.000	123,88	-	0,00	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 bulan		Provinsi Banten	15.000.000	0,0273		3,04	0,00	1.950.000	13,00	-	0,00	
26.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA				60.000.000	0,109	95	94,29	0,10	56.575.900	94,29	3.424.100	5,71	
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Paket		Provinsi Banten	60.000.000	0,109		94,29	0,10	56.575.900	94,29	3.424.100	5,71	
27.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA				28.800.000	0,0523	53,98	50,98	0,03	13.616.776	47,28	15.183.224	52,72	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan		Provinsi Banten	28.800.000	0,0523		47,28	0,02	13.616.776	47,28	15.183.224	52,72	
28.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD				137.700.000	0,2502	78,97	76,97	0,19	98.969.560	71,87	38.730.440	28,13	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	10 Bulan		Provinsi Banten	56.028.600	0,1018		21,08	0,02	29.022.100	51,80	27.006.500	48,20	
2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	7 Bulan		Provinsi Banten	21.480.000	0,039		5,20	0,00	7.160.000	33,33	14.320.000	66,67	
29.	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup				915.958.000	1,6644	44,11	42,11	0,70	340.452.690	37,17	575.505.310	62,83	
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	1 dokumen		Provinsi Banten	323.750.000	0,5883		19,00	0,11	61.514.000	19,00	262.236.000	81,00	
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi	1 dokumen		Provinsi Banten	592.208.000	1,0761		47,10	0,51	278.938.690	47,10	313.269.310	52,90	
30.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				51.850.000	0,0942	58,54	53,54	0,05	13.633.000	26,29	38.217.000	73,71	
1.	Pengisolasian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	1 dokumen		Provinsi Banten	26.750.000	0,0486		41,81	0,02	11.183.000	41,81	15.567.000	58,19	
2.	Penghentian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 dokumen		Provinsi Banten	25.100.000	0,0456		9,76	0,00	2.450.000	9,76	22.650.000	90,24	
31.	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup				69.350.000	0,126	57,2	55,20	0,07	35.246.500	50,82	34.103.500	49,18	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1 dokumen		Provinsi Banten	25.480.000	0,0463		66,09	0,03	16.840.000	66,09	8.640.000	33,91	
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 dokumen		Provinsi Banten	43.870.000	0,0797		41,96	0,03	18.406.500	41,96	25.463.500	58,04	
32.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk.				226.504.000	0,4116	47,67	45,67	0,19	94.757.900	41,83	131.746.100	58,17	
1.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Sampel Internal	257 Sampel		Provinsi Banten	226.504.000	0,4116		41,83	0,17	94.757.900	41,83	131.746.100	58,17	
33.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk				221.950.000	0,40	35,33	33,33	0,13	59.910.000	26,99	162.040.000	73,01	
1.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	34 Parameter		Provinsi Banten	221.950.000	0,4033		26,99	0,11	59.910.000	26,99	162.040.000	73,01	
34.	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi				663.930.000	1,2065	33,3	30,30	0,37	174.615.000	26,30	489.315.000	73,70	
1.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	8 Dokumen		Provinsi Banten	395.170.000	0,7181		12,94	0,09	85.895.000	21,74	309.275.000	78,26	
2.	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	1 Dokumen		Provinsi Banten	30.000.000	0,0545		1,31	0,00	8.700.000	29,00	21.300.000	71,00	
3.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan	1 Dokumen		Provinsi Banten	201.290.000	0,3658		10,22	0,04	67.880.000	33,72	133.410.000	66,28	
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana	1 Dokumen		Provinsi Banten	37.470.000	0,0681		1,83	0,00	12.140.000	32,40	25.330.000	67,60	

35.	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			Provinsi Banten	1.120.000.000	2,0352	52,7	50,70	1,03	488.750.810	43,64	631.249.190	56,36
	1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	1 Dokumen	Provinsi Banten	60.000.000	0,109		4,08	0,00	2.448.630	4,08	57.551.370	95,92
	2.	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	4 kali/ 1 Dokumen	Provinsi Banten	1.060.000.000	1,9262		45,88	0,88	486.302.180	45,88	573.697.820	54,12
36.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				396.100.000	0,7198	37	33,20	0,24	112.820.000	28,48	283.280.000	71,52
	1.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan	34 Lembaga	Provinsi Banten	396.100.000	0,7198		28,48	0,21	112.820.000	28,48	283.280.000	71,52
37.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				58.620.000	0,1065	9	0,00	0,00	-	0,00	58.620.000	100,00
	1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen	Provinsi Banten	29.310.000	0,0533		0,00	0,00	-	0,00	29.310.000	100,00
	2.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen	Provinsi Banten	29.310.000	0,0533		0,00	0,00	-	0,00	29.310.000	100,00
38.	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				362.308.000	0,6584	53,13	50,13	0,33	164.160.280	45,31	198.147.720	54,69
	1.	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	Provinsi Banten	150.000.000	0,2726		77,87	0,21	116.800.280	77,87	33.199.720	22,13
	2.	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	1 dokumen	Provinsi Banten	50.000.000	0,0909		28,34	0,03	14.170.000	28,34	35.830.000	71,66
	3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan Hutan	1 dokumen	Provinsi Banten	39.140.000	0,0711		22,18	0,02	8.680.000	22,18	30.460.000	77,82
	4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan Hutan	1 dokumen	Provinsi Banten	39.140.000	0,0711		0,00	0,00	-	0,00	39.140.000	100,00
	5.	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	1 dokumen	Provinsi Banten	50.000.000	0,0909		24,84	0,02	12.420.000	24,84	37.580.000	75,16
	6.	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	1 dokumen	Provinsi Banten	34.028.000	0,0618		35,53	0,02	12.090.000	35,53	21.938.000	64,47
39.	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				361.950.000	0,6577	22,2	20,20	0,13	51.768.100	14,30	310.181.900	85,70
	1.	PENGOLAHAN BAHAN BAKU HASIL HUTAN BUKAN KAYU HAYATI	1 Komoditas	Provinsi Banten	36.720.000	0,0667		90,40	0,06	33.194.600	90,40	3.525.400	9,60
	2.	FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PENERBITAN IJIN USAHA INDUSTRI PRIMER	1 dokumen	Provinsi Banten	16.710.000	0,0304		31,79	0,01	5.312.500	31,79	11.397.500	68,21
	3.	PEMBUDIDAYAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DENGAN TIDAK MENGURANGI	4 Komoditas	Provinsi Banten	283.520.000	0,5152		1,97	0,01	5.579.000	1,97	277.941.000	98,03
	4.	PENGAWASAN PERIJINAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	1 dokumen	Provinsi Banten	25.000.000	0,0454		30,73	0,01	7.682.000	30,73	17.318.000	69,27
40.	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000m3/tahun				168.080.000	0,3054	75,1	70,10	0,21	111.090.000	66,09	56.990.000	33,91
	1.	Rencana Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	1 dokumen	Provinsi Banten	62.220.000	0,1131		92,21	0,10	57.370.000	92,21	4.850.000	7,79
	2.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	1 Kegiatan	Provinsi Banten	50.000.000	0,0909		36,24	0,03	18.120.000	36,24	31.880.000	63,76
	3.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIP)	1 dokumen	Provinsi Banten	55.860.000	0,1015		63,73	0,06	35.600.000	63,73	20.260.000	36,27
41.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK PSC				2.230.191.800	4,0526	32	25,23	1,02	133.707.800	6,00	2.096.484.000	94,00
	1.	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRHL)	1 dokumen	Provinsi Banten	50.000.000	0,0909		97,56	0,09	48.777.800	97,56	1.222.200	2,44
	2.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	125 Hektar, 4 Unit	Provinsi Banten	1.118.745.000	2,0329		0,00	0,00	-	0,00	1.118.745.000	100,00

3.	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	800 batang		Provinsi Banten	345.034.000	0,627		22,56	0,14	77.840.000	22,56	267.194.000	77,44	
4.	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	48 Unit		Provinsi Banten	591.412.800	1,0747		0,00	0,00	-	0,00	591.412.800	100,00	
5.	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2 Unit		Provinsi Banten	100.000.000	0,1817		0,56	0,00	560.000	0,56	99.440.000	99,44	
6.	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	12 Bulan		Provinsi Banten	25.000.000	0,0454		0,00	0,00	6.530.000	26,12	18.470.000	73,88	
42.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK LT				6.450.900.100	11,722	12,7	10,70	1,25	255.927.051	3,97	6.194.973.049	96,03	
1.	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	1 Dokumen		Provinsi Banten	50.000.000	0,0909		0,00	0,00	-	0,00	50.000.000	100,00	
2.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	175 Hektar		Provinsi Banten	890.610.000	1,6184		1,92	0,03	17.087.000	1,92	873.523.000	98,08	
3.	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1000 batang		Provinsi Banten	300.000.000	0,5451		76,38	0,42	229.132.649	76,38	70.867.351	23,62	
4.	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	720 unit		Provinsi Banten	5.011.520.100	9,1067		0,03	0,00	1.700.000	0,03	5.009.820.100	99,97	
5.	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 Unit		Provinsi Banten	173.770.000	0,3158		2,85	0,01	4.950.000	2,85	168.820.000	97,15	
6.	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	10 Bulan		Provinsi Banten	25.000.000	0,0454		12,23	0,01	3.057.402	12,23	21.942.598	87,77	
43.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD SPTH				420.190.000	0,7635	59,56	57,56	0,44	218.010.250	51,88	202.179.750	48,12	
1.	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	180100 batang		Provinsi Banten	420.190.000	0,7635		51,88	0,40	218.010.250	51,88	202.179.750	48,12	
44.	Perbenihan Tanaman Hutan				253.054.000	0,4598	37,1	35,10	0,16	77.355.900	30,57	175.698.100	69,43	
1.	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	1 Dokumen		Provinsi Banten	58.000.000	0,1054		28,51	0,03	16.535.600	28,51	41.464.400	71,49	
2.	Sertifikasi Sumber Benih	1 Dokumen		Provinsi Banten	58.000.000	0,1054		16,84	0,02	9.770.000	16,84	48.230.000	83,16	
3.	Sertifikasi Mutu Benih	1 Dokumen		Provinsi Banten	37.704.000	0,0685		15,55	0,01	5.862.000	15,55	31.842.000	84,45	
4.	Sertifikasi Mutu Bibit	1 Dokumen		Provinsi Banten	49.550.000	0,09		37,72	0,03	18.689.000	37,72	30.861.000	62,28	
5.	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	1 Dokumen		Provinsi Banten	49.800.000	0,0905		53,21	0,05	26.499.300	53,21	23.300.700	46,79	
45.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				456.304.000	0,8292	89,98	87,89	0,73	382.385.500	83,80	73.918.500	16,20	
1.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	2 Kelompok		Provinsi Banten	90.686.000	0,1648		72,43	0,12	65.688.000	72,43	24.998.000	27,57	
2.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	60 Kelompok		Provinsi Banten	87.522.000	0,159		78,28	0,12	68.512.500	78,28	19.009.500	21,72	
3.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	2 Kelompok		Provinsi Banten	278.096.000	0,5053		89,24	0,45	248.185.000	89,24	29.911.000	10,76	
46.	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				391.436.000	0,7113	64,12	62,12	0,44	227.050.300	58,00	164.385.700	42,00	
1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	1 dokumen		Provinsi Banten	75.000.000	0,1363		99,93	0,14	74.947.000	99,93	53.000	0,07	
2.	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	1 dokumen		Provinsi Banten	150.000.000	0,2726		65,38	0,18	98.062.500	65,38	51.937.500	34,63	

3.	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	1 Kegiatan		Provinsi Banten	50.000.000	0,0909		89,56	0,08	44.778.800	89,56	5.221.200	10,44	
4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1 Kegiatan		Provinsi Banten	75.000.000	0,1363		0,00	0,00	-	0,00	75.000.000	100,00	
5.	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	1 Dokumen		Provinsi Banten	25.000.000	0,0454		8,00	0,00	2.000.000	8,00	23.000.000	92,00	
6.	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	1 Dokumen		Provinsi Banten	16.436.000	0,0299		44,18	0,01	7.262.000	44,18	9.174.000	55,82	
47	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				287.712.000	0,5228	75,19	73,19	0,38	197.313.625	68,58	90.398.375	31,42	
1.	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	1 dokumen		Provinsi Banten	50.000.000	0,0909		9,50	0,01	4.750.000	9,50	45.250.000	90,50	
2.	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	667 Batang		Provinsi Banten	41.022.000	0,0745		0,00	0,00	-	0,00	41.022.000	100,00	
3.	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	2.635 Batang		Provinsi Banten	196.690.000	0,3574		97,90	0,35	192.563.625	97,90	4.126.375	2,10	
48	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK LT				33.180.000	0,0603	69,6	67,67	0,04	20.539.000	61,90	12.641.000	38,10	
1.	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi d	1 Dokumen		Provinsi Banten	33.180.000	0,0603		61,90	0,04	20.539.000	61,90	12.641.000	38,10	
49	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDL				96.230.000	0,1749	30,65	25,65	0,04	10.077.500	10,47	86.152.500	90	
1.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	1 Dokumen		Provinsi Banten	25.000.000	0,0454		12,04	0,01	3.010.000	12,04	21.990.000	87,96	
2.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	1 Dokumen		Provinsi Banten	25.240.000	0,0459		9,13	0,00	2.305.000	9,13	22.935.000	90,87	
3.	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosist	1 Dokumen		Provinsi Banten	45.990.000	0,0836		10,36	0,01	4.762.500	10,36	41.227.500	89,64	
50.	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Conve				39.040.000	0,0709	17,12	15,12	0,01	500.000	1,28	38.540.000	98,72	
1.	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi d	1 Dokumen		Provinsi Banten	39.040.000	0,0709		1,28	0,00	500.000	1,28	38.540.000	98,72	
51.	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDL				93.030.000	0,17	27,25	25,25	0,04	6.000.000,00	6,45	87.030.000,00	93,55	
1.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	1 Dokumen		Provinsi Banten	16.810.000	0,0305		0,00	0,00	-	0,00	2.170.000,00	12,91	
2.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	1 Dokumen		Provinsi Banten	16.220.000	0,0295		0,00	0,00	-	0,00	16.220.000,00	100,00	
3.	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosist	1 Dokumen		Provinsi Banten	60.000.000	0,109		6,45	0,01	6.000.000,00	10,00	54.000.000,00	90,00	
52.	Pengelolaan Tahura Provinsi				908.605.360	1,6511	59,2	57,20	0,94	480.405.310	52,87	428.200.050	47,13	
1.	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	1 Dokumen, 4 Lokasi		Carita	84.188.000	0,153		8,26	0,01	75.090.000	89,19	9.098.000	10,81	
2.	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	12 Bln, 1.595,9 Ha		Carita	125.160.000	0,2274		7,29	0,02	66.240.000	52,92	58.920.000	47,08	

3.	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat	1 Desa		Carita	10.000.000	0,0182		1,10	0,00	10.000.000	100,00	-	0,00	
4.	Pengawetan Koridor Hidupan Liar	1 Dokumen		Carita	10.000.000	0,0182		0,00	0,00	-	0,00	10.000.000	100,00	
5.	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	12,5 Hektar		Carita	72.800.000	0,1323		7,84	0,01	71.270.000	97,90	1.530.000	2,10	
6.	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	3 Desa, 12,5 Ha		Carita	60.700.000	0,1103		0,00	0,00	-	0,00	60.700.000	100,00	
7.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Tahura Provinsi	1 Dokumen		Carita	22.548.000	0,041		1,96	0,00	17.810.500	78,99	4.737.500	21,01	
8.	Kerjasama penyelenggaraan Tahura Provinsi	2 Lokasi, 2 Desa		Carita	20.740.000	0,0377		0,00	0,00	-	0,00	20.740.000	100,00	
9.	Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura Provinsi	600 Kg, 600 Btg, 700 Kg, 2 desa		Carita	81.540.000	0,1482		0,00	0,00	-	0,00	81.540.000	100,00	
10.	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	2 Dokumen		Carita	35.000.000	0,0636		0,00	0,00	-	0,00	35.000.000	100,00	
11.	Perencanaan Pengelolaan Tahura	3 Dokumen		Carita	385.929.360	0,7013		26,41	0,19	239.994.810	62,19	145.934.550	37,81	
Jumlah					55.031.165.240	100	50,39		50,30	25.875.631.730	47,02	29.155.533.510	52,98	

Tabel 2.10. Pengukuran Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Semester I Tahun 2021

NO	URUSAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Keuangan (%)	Realisasi	Persentase (%)	Ket
						Uraian	Tolok Ukur/ Sub Kegiatan	Target						
1		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Satuan : Nilai)	85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Belum Dapat diukur S/D Triwulan 4
			Capaian	100%										Belum Dapat diukur S/D Triwulan 4
			Persentase Persentase terwujudnya	100%										Belum Dapat diukur S/D Triwulan 4
			Persentase sarana prasarana	100%										Belum Dapat diukur S/D Triwulan 4
			Persentase terwujudnya	100%										Belum Dapat diukur S/D Triwulan 4
									400.000.000	88.916.500	22	11 DOKUMEN	45,45	
									100.000.000	54.276.500	54	7 DOKUMEN	87,5	Rapat Forum OPD, Rapat Forum Renja OPD, Rapat Analisa resiko, Rapat Review Renstra
									10.000.000	-	-	0	0	
									10.000.000	-	-	0	0	
									10.000.000	-	-	0	0	
									10.000.000	-	-	0	0	
									10.000.000	-	-	0	0	
									140.000.000	18.660.000	13	2 DOKUMEN	40	Rapat Capaian dan realisasi Kinerja
									120.000.000	15.980.000	13	2 DOKUMEN	40	
									27.920.763.980	17.197.816.036	62	8 BULAN, 6 Dokumen	75	
									26.891.719.980	16.915.601.036	63	8 BULAN	57,14	Daftar gaji dan Tukin
									986.044.000	260.815.000,00	26,45	1 dokumen	100	Daftar Honor
									7.000.000	7.000.000,00	100,00	1 dokumen	100	Rapat Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
									7.000.000	3.450.000,00	49,29	1 dokumen	100	Perjalanan Dinas Ke Kab.Lebak.
									7.000.000	3.450.000,00	49,29	1 dokumen	100	Perjalanan Dinas Ke Kab.Lebak.
									7.000.000	-	-	0	0	
									8.000.000	4.000.000,00	50,00	1 dokumen	100	Perjalanan Dinas Ke Kab.Pandeglang (TAHURA) Bulan April s/d Juni
									7.000.000	3.500.000,00	50,00	1 dokumen	100	

						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			36.000.000	15.000.000	41,67	6 Bulan	45	
							1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan		36.000.000	15.000.000	41,67	6 Bulan	50	Terlaksananya jasa penatausahaan BMD pada SKPD
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			144.800.000	118.750.000	82,01	245 STEL	85	
							1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	245 Stel		119.800.000	117.900.000	98,41	245 STEL	100	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya
															Pendistribusian pakaian dinas
							2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	12 Bulan		25.000.000	850.000	3,40	6 Bulan	50	Kenaikan gaji berkala
															SK Anjab Esselon
															SK Anjab Pelaksana
															Kenaikan Pangkat
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			467.195.000	187.488.000	40,13	6 BULAN	50	
							1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan		25.350.000	15.158.000	59,79	6 BULAN	50	Terlaksananya Belanja Alat Listrik
							2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan		134.225.000	64.817.000	48,29	6 BULAN	50	Terlaksananya Belanja ATK, Belanja Kertas, Belanja Benda Pos dan Belanja Perabot
							3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan		98.164.000	24.024.000	24,47	6 BULAN	50	Terlaksananya Belanja bahan Logistik
							4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan		67.000.000	33.202.000	49,56	6 BULAN	50	Terlaksananya Belanja Cetak
							5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan		60.000.000	16.778.000	27,96	6 BULAN	50	Terlaksananya Belanja Surat kabar
							6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan		77.456.000	28.509.000	36,81	6 BULAN	50	Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
							7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen		5.000.000	5.000.000	100,00	1 DOKUMEN	100	Terlaksananya Kebutuhan Belanja Penatausahaan arsip
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			121.430.000	67.125.000	55,28	6 BULAN	75	
							1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Bulan		83.430.000	45.000.000	53,94	6 BULAN	50	Terlaksananya Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya
							2 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	6 Bulan		38.000.000	22.125.000	58,22	6 Bulan	100	Terlaksananya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersebidanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.895.701.000	3.299.053.784	47,84	6 BULAN	50	
							1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan		522.042.456	209.330.376	40,10	6 BULAN	50	Terlaksananya Belanja Telepon dan Listrik
							2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan		6.373.658.544	3.089.723.408	48,48	6 BULAN	50	Terlaksananya jasa Pelayanan umum Kantor

[illegible]

[illegible]

2	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Penegakan Hukum	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai) Indeks Kualitas Udara (Satuan: Persentase peningkatan Peningkatan Peran Persentase ketepatan pelaku	51,83 53,00 68,80 17,6 (%) 76 kelompok 98 (%)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pencegahan dan/ atau kerusakan lingkungan hidup 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dokumen 1 Dokumen						Belum Dapat diukur S/D Triwulan 4 Belum Dapat diukur S/D Triwulan 4 Belum Dapat diukur S/D Triwulan 4 Belum Dapat diukur S/D Triwulan 4 Belum Dapat diukur S/D Triwulan 4 Belum Dapat diukur S/D Triwulan 4
								915.958.000	340.452.690	37,17	2 Dokumen	50	
								323.750.000	61.514.000	19,00	1 Dokumen	50	
								592.208.000	278.938.690	47,10	1 Dokumen	50	Pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menuju tingkat Nasional di Kec. Larangan Kota Tangerang Pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menuju tingkat Nasional di Kabupaten Tangerang Pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menuju tingkat Nasional di Kec. Cibodasari Kota Tangerang Pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menuju tingkat Nasional di Kec. Cikeusal Kabupaten Serang
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 1 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 dokumen 1 dokumen						
					Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1 Dokumen 1 Dokumen						
								69.350.000	35.246.500	50,82	2 dokumen	65	
								25.480.000	16.840.000	66,09	1 dokumen	70	
								43.870.000	18.406.500	41,96	1 dokumen	60	2. Pembinaan Kelompok Bank Sampah di Kab. Pandeglang Rencana pelaksanaan kegiatan tanggal 28 Juni 2021 dan Pembinaan Kelompok Bank Sampah di Kab. Serang Rencana pelaksanaan kegiatan tanggal 29 Juni 2021 , sehubungan dengan adanya surat edaran Gub Nomor :800/1357-BKD/2021 tentang Penyusunan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Batasan Bepergian ke Luar Daerah di Lingkungan Pemerintah Prov.Banten yang menyebutkan tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, tidak lebih dari lima orang dengan jarak dua meter, maka jika kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencan, realisasi akan dilaksanakan pada bulan berikutnya

[illegible]

3	Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta	Rasio Cakupan Peningkatan Konservasi dan Peningkatan Peran serta masyarakat Tersedianya benih unggul yang Peningkatan fungsi UPTD TAHURA Luas Lahan kritis yang terehabilitasi Luas Lahan kritis yang terehabilitasi Peningkatan Pemanfaatan Peningkatan peran serta masyarakat Peningkatan peran serta masyarakat	32,71 20 (%) 10 (kelompok) 180.000 (batang) 12,5 (%) 2.500 (Ha) 2.500 (Ha) 10 (%) 3 (kelompok) 3 (kelompok)	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Prov	7 Lmbaga 25 Lembaga 2 Lembaga 4 Kali 1 Dokumen	396.100.000	112.820.000,00	28,48	7 lembaga, 25 lembaga	94,12						
										396.100.000	112.820.000,00	28,48	7 lembaga, 25 lembaga	94,12	Terlaksananya Penilaian Sekolah dan Berbudaya Lingkungan , Terlaksananya Penilaian Kota Berwawasan Lingkungan di Provinsi Banten, Terlaksananya Peningkatan Kapasitas bagi Pemerhati Lingkungan dan Masyarakat Hukum			
										1.120.000.000	488.750.810	44	1 dokumen	50				
										60.000.000	2.448.630	4	0	0	Penyusunan dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3 (kajian FS.Limbah B3) belum terealisasi karena pihak ketiga dalam mengumpulan data primer terkendala kondisi pandemi yang sampai bulan ini masih terus meningkat			
										1.060.000.000	486.302.180	46	1 dokumen	26	1. Pengelolaan Kebersihan Banten Lama (kegiatan rutin setiap bulan)			
																Belum Dapat diukur S/D Triwulan 4		
																Belum Dapat diukur S/D Triwulan 4		
																Belum Dapat diukur S/D Triwulan 4		
																Belum Dapat diukur S/D Triwulan 4		
																Belum Dapat diukur S/D Triwulan 4		
																Belum Dapat diukur S/D Triwulan 4		
																Belum Dapat diukur S/D Triwulan 4		
																Belum Dapat diukur S/D Triwulan 4		
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terlaksananya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 1 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 2 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan diKawasan Hutan Produksi	2 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	362.308.000	164.160.280	45,31	5 Dokumen	75	
													150.000.000	116.800.280,00	77,87	2 Dokumen	80	Konsultasi dan Koordinasi terkait Identifikasi Hutan Cadangan
													50.000.000	14.170.000,00	28,34	1 Dokumen	30	
													39.140.000	8.680.000,00	22,18	1 Dokumen	100	

[illegible]

						3	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	175 Ha	300.000.000	229.132.649	76,38	800 batang	100	Realisasi Pengadaan Untuk Penghijauan Lingkungan di Kabupaten Tangerang, realisasi Pengadaan Untuk Pembangunan Kebun Bibit Desa (KBD) Kabupaten Lebak dan realisasi Penyusunan Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RKRHL) Pembuatan Hutan Rakyat di Kab. Lebak
						4	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	720 unit	5.011.520.100	1.700.000	0,03	0 unit	0,5	rapat Persiapan, dan perencanaan perjalanan Dinas
						5	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 unit	173.770.000	4.950.000	2,85	1 unit	5	rapat Persiapan, dan perencanaan perjalanan Dinas
						6	Pembinaan dan/atau dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	10 Bulan	25.000.000	3.057.402	12,23	6 Bulan	60	Perjaldin dalam daerah survey calon lokasi HR dan Sipil Teknis
							Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK PSC							
							<i>Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan diluar kawasan hutan negara</i>		2.230.191.800	133.707.800	6,00	800 batang, 6 bulan	27,91	
						1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	1 Dokumen	50.000.000	48.777.800	97,56	1 Dokumen	100	Rapat persiapan penyusunan Dokumen RtnRL 2022
														Koordinasi dan konsultansi lahan kritis ke BPDAS-HL Bogor
						2	Pembangunan Hutan Rakyat di luar Kawasan Hutan Negara	125 Ha	1.118.745.000	-	0,00	0	0	Rapat koordinasi usulan KBD dan presentasi forum DAS Cidanau
						3	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	800 batang	345.034.000	77.840.000	22,56	0	25	Pemeliharaan penghijauan lingkungan di Kelurahan Trondol Kecamatan Kota Serang Kota Serang
														Pemeliharaan penghijauan lingkungan di Kelurahan Juhut Kecamatan Karangtanjung kab. Pandeglang
														1. Belanja Bahan-Bahan bangunan dan konstruksi (Bambu dan sepatu Boots)
														2. Belanja bahan-bahan kimia (Bahan kimia cair dan pupuk organik/kandang)
														3. Belanja bahan/bibit tanaman (Bibit Mangga, Durian dan benih albasia)
														4. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor (Paranet dan Polybag)
														1. Belanja Bahan-Bahan bangunan dan konstruksi (Bambu dan sepatu Boots)
														2. Belanja bahan-bahan kimia (Bahan kimia cair dan pupuk organik/kandang)
														3. Belanja bahan/bibit tanaman (Bibit Mangga, Durian dan benih albasia)
														4. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor (Paranet dan Polybag)
														1. Belanja Bahan-Bahan bangunan dan konstruksi (Bambu dan sepatu Boots)
														2. Belanja bahan-bahan kimia (Bahan kimia cair dan pupuk organik/kandang)

[illegible]

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 95

						3 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	1 Kegiatan	50.000.000	44.778.800	89,56	1 kegiatan	100	Pemberian bibit tanaman sebanyak 620 batang yang terdiri dari 200 batang bibit tanaman durian, 220 batang bibit jengkol dan 200 batang bibit klengkeng serta bahan kimia pupuk kandang sebanyak 1000kg dan NPK 100kg. Diserahkan kepada kelompok tani Budiasih yang berada di Desa Rancasanggal Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, yang nantinya akan di tanam
						4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1 Kegiatan	75.000.000	-	0	0 dokumen	0	Tingginya kenaikan kasus covid-19 di daerah yang menjadi tujuan studi tiru (DIY Yogyakarta) oleh karena itu kegiatan tersebut di tunda sehingga tidak dapat dilaksanakan pada Bulan Juni 2021
						5 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	1 dokumen	25.000.000	2.000.000	8	1 dokumen	20	Rapat koordinasi membahas tentang penyusunan Surat Keputusan Gubernur Banten tentang Perubahan Struktur Inti Organisasi Forum Komunikasi DAS Cidanau. Dimana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten No. 124.3/Kep.64-Huk/2002, tentang Pembentukan Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) ada beberapa poin di dalam struktur inti organisasi
						6 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	1 dokumen	16.436.000	7.262.000	44,18	1 dokumen	50	Perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dan juga monitoring dan evaluasi ke kelompok tani yang berada di wilayah kabupaten Serang, Pandeglang, dan juga Kabupaten Lebak.
JUMLAH								55.031.165.240	25.875.631.730	47,02		53	

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten melaksanakan penyesuaian/perubahan terhadap Renja Tahun 2021 antara lain adanya bencana pandemic covid 19 di Provinsi Banten dan penanganan/pemulihannya sehingga diperlukan beberapa penyesuaian anggaran dan target kinerja yang telah ditetapkan serta penyesuaian jumlah anggaran pada beberapa kegiatan dalam rangka mendukung program pemerintah daerah dalam penanganan covid 19 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten pada tahun 2021. Terkait hal-hal tersebut diatas perlu dilaksanakan penyesuaian-penyesuaian diantaranya perubahan pergeseran, pengurangan dan penambahan anggaran pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Penyesuaian yang dilakukan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2021 ini diharapkan tetap mampu memaksimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.

Pagu Anggaran Perubahan Renja Tahun 2021 diawali melalui kegiatan Refocusing Anggaran yang dilaksanakan sebanyak satu tahapan, selanjutnya pada proses Perubahan Anggaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 terjadi beberapa perubahan target baik Pendapatan maupun Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain : Rencana Pendapatan terjadi penyesuaian atau perubahan target dari Target sebelum perubahan sebesar **Rp.190.000.000,-** menjadi **Rp.126.000.000,-** sedangkan Kegiatan Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten pada Perubahan Anggaran TA 2021 mengalami perubahan dari pagu murni sebesar **Rp. 55.900.021.240,-** menjadi **Rp.60.799.345.260,-**

Selengkapnya Rencana Target Pendapatan, Belanja/rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2021 tersaji pada tabel tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rencana Target Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Perubahan Anggaran Tahun 2021

Koding	Uraian	Jumlah Target Pendapatan (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	190.000.000	126.000.000	(64.000.000)	(33,68)
4.1.02	Retribusi Daerah	190.000.000	126.000.000	(64.000.000)	(33,68)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	190.000.000	126.000.000	(64.000.000)	(33,68)
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	190.000.000	126.000.000	(64.000.000)	(33,68)
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	179.200.000	120.600.000	(58.600.000)	(32,70)
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	10.800.000	5.400.00	(5.400.000)	(50,00)

**Tabel 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Belanja pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2021
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten**

NO	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Keterangan OPD	Unit OPD
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum (Pagu Murni)	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
2.	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
2.11.01	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup											42.989.323.480	47.006.578.820	4.017.255.340			
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											38.839.323.480	43.638.108.730	4.798.785.250			
2.11.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											400.000.000	303.500.000	(96.500.000)			Sekretaria
2.11.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Bidang LHK 1 dok, Tersusunnya Dokumen Analisa Resiko 1 dok, Tersusunnya DRK dan ROK DLHK 1 dok, Tersusunnya Perjanjian Kinerja PERKIN 2021 1 dok, Tersusunnya Rancangan Awal Renja Tahun 2022 1 dok, Tersusunnya Renja Akhir (Final) tahun 2022 1 dok, Tersusunnya Renja Perubahan Tahun 2021 1 dok, Tersusunnya RUP 2021 1 dok	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	8 dok	8 dok	85 Nilai	85 Nilai	100.000.000	73.510.000	(26.490.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengurangan dari Perjalanan Dinas, Makan Minum	
2.11.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen RKA Tahun 2022	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	1 dok	1 dok	85 Nilai	85 Nilai	10.000.000	7.400.000	(2.600.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengurangan dari belanja Makan minum	

2.11.01.03.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen RKAPerubahan 2021	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	1 dok	1 dok	85 Nilai	85 Nilai	10.000.000	7.400.000	(2.600.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengurangan dari belanja Makan minum	
2.11.01.03.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen DPA Tahun 2022	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	1 dok	1 dok	85 Nilai	85 Nilai	10.000.000	3.100.000	(6.900.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengurangan dari Perjalanan Dinas	
2.11.01.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen DPAPerubahan 2021	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	1 dok	1 dok	85 Nilai	85 Nilai	10.000.000	3.100.000	(6.900.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengurangan dari Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
2.11.01.03.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	1. Terlaksananya Evaluasi SAKIP Kegiatan DLHK Provinsi Banten (Triwulanan) 2. Terlaksananya Pengelolaan PPIID Pembantu DLHK Provinsi Banten 3. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Indikator Pembangunan Bidang LHK Provinsi Banten Semester 1 dan 2 Tahun 2020 4. Tersusunnya Data Statistik Sektoral Bidang LHK Provinsi Banten 5. Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik (Laporan Bulanan), Laporan Realisasi Barang dan Jasa DLHK Provinsi Banten	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	6 dok	6 dok	85 Nilai	85 Nilai	140.000.000	85.420.000	(54.580.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengurangan dari Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
2.11.01.03.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	1. Terlaksananya Pengelolaan Website DLHK Provinsi Banten 2. Tersusunnya Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja DLHK Provinsi Banten Tahun 2021 3. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemenerintah Daerah (LPPD) DLHK Provinsi Banten 4. Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DLHK Provinsi Banten 5. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLHK Provinsi Banten	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	5 dok	5 dok	85 Nilai	85 Nilai	120.000.000	123.570.000	3.570.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penambahan dari pergeseran dari biaya makan minum, narasumber dan perjalanan dinas yang diperuntukan untuk biaya rapat evaluasi kegiatan akhir tahun	

2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											27.920.763.980	32.852.224.000	4.931.460.020			Sekretariat
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	12 bln	14 bln	85 Nilai	85 Nilai	26.891.719.980	32.131.900.000	5.240.180.020	DAU dan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penambahan Gaji dan TPPNS (Dalam SIPD target setelah perubahan menjadi 14 bulan	
2.11.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	1 dok	1 dok	85 Nilai	85 Nilai	986.044.000	686.044.000	(300.000.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengurangan Honor PPTK	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	1 dok	1 dok	85 Nilai	85 Nilai	7.000.000	7.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2.11.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	1 dok	1 dok	85 Nilai	85 Nilai	7.000.000	4.390.000	(2.610.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	1 dok	1 dok	85 Nilai	85 Nilai	7.000.000	4.390.000	(2.610.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
2.11.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	1 dok	1 dok	85 Nilai	85 Nilai	7.000.000	5.400.000	(1.600.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengurangan dari makan minum	
2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	1 dok	1 dok	85 Nilai	85 Nilai	8.000.000	6.100.000	(1.900.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	

2.11.01.02.03	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	1 dok	1 dok	85 Nilai	85 Nilai	7.000.000	7.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2.11.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											36.000.000	36.000.000	-			Sekretariat
2.11.01.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	36.000.000	36.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2.11.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											144.800.000	121.800.000	(23.000.000)			Sekretariat
2.11.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	12 bulan	246 stel	85 Nilai	85 Nilai	119.800.000	119.800.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2.11.01.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	1 dok	1 dok	85 Nilai	85 Nilai	25.000.000	2.000.000	(23.000.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengurangan Belanja Kursus/Pelatihan, dan penggantian	
2.11.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											520.259.000	502.195.000	(18.064.000)			Sekretariat
2.11.01.06.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya komponen instalasi listrik/penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	25.350.000	25.350.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2.11.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	134.225.000	202.321.000	68.096.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penambahan belanja tinta, toner printer, Refill APAR dan Materai dan Gorden, wallpaper	
2.11.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	98.164.000	98.164.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

2.11.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	67.000.000	67.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2.11.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug KP3B	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	60.000.000	41.904.000	(18.096.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengurangan Volume belanja surat kabar	
2.11.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug KP3B	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	130.520.000	62.456.000	(68.064.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan dinas luar daerah	
2.11.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	5.000.000	5.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	tidak ada pengurangan	
2.11.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											121.430.000	156.430.000	35.000.000			Sekretariat
2.11.01.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug KP3B	100.00 %	100.00 %	12 bulan	22 unit	85 Nilai	85 Nilai	83.430.000	118.430.000	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengadaan Belanja Modal mesin Pompa Air (pompa utama 1 unit dan pompa pendorong 3 unit) dan Pengeboran, AC 1 pk 10 unit, Printer canon 2 unit, Printer epson 6 unit,	
2.11.01.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug KP3B	100.00 %	100.00 %	12 bulan	7 unit	85 Nilai	85 Nilai	38.000.000	38.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	AC 2pk 3 unit, Kipas pendorong/Hekso s 4 unit	
2.11.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											6.895.701.000	6.825.603.300	(70.097.700)			Sekretariat
2.11.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug KP3B	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	522.042.456	522.042.456,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

2.11.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug KP3B	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	6.373.658.544	6.303.560.844	(70.097.700)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengurangan belanja jasa pelayanan umum sebesar Rp. 133,900.000, dan dialihkan ke belanja sewa gedung sebesar Rp.109,200.000 dan belanja jasa DED gudang sebesar Rp. 24.700.000 dan penambanahn honor PKSM	
2.11.01.01.01.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											457.410.000	572.110.000	114.700.000			Sekretariat
2.11.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug KP3B	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	73.500.000	73.500.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2.11.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug KP3B	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	216.750.000	246.750.000	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BBM Operasional	
2.11.01.01.01.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug KP3B	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	133.000.000	202.700.000	69.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	gedung kantor dan DED	
2.11.01.01.01.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terpeliharanya /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kota Serang Kec Curug KP3B	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	34.160.000	49.160.000	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemeliharaan Laptop/Printer	
2.11.01.01.01.07	Administrasi Umum Perangkat Daerah											422.529.500	387.642.000	(34.887.500)			UPTD Lab Ling
2.11.01.01.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	UPTD Lab Ling (Kota Serang, Curug, Curug)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	2.425.000	2.425.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

2.11.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	tersedianya alat tulis kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	UPTD Lab Ling (Kota Serang, Curug, Curug)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	OIU	20.372.500	#VALUE!	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2.11.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	tersedianya Bahan Logistik makanan dan minuman	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	UPTD Lab Ling (Kota Serang, Curug, Curug)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	303.902.000	303.902.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2.11.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	UPTD Lab Ling (Kota Serang, Curug, Curug)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	1.202.500	1.202.500	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2.11.01.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	UPTD Lab Ling (Kota Serang, Curug, Curug)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	115.000.000	59.740.000	(55.260.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lainnya	
2.11.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											27.205.000	27.205.000	-			UPTD Lab Ling
2.11.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	UPTD Lab Ling (Kota Serang, Curug, Curug)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	2 unit	85 Nilai	85 Nilai	27.205.000	27.205.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2.11.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											370.200.000	370.200.000	-			UPTD Lab Ling
2.11.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	UPTD Lab Ling (Kota Serang, Curug, Curug)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	370.200.000	370.200.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2.11.01.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											242.400.000	242.400.000	-			UPTD Lab Ling
2.11.01.08.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	UPTD Lab Ling (Kota Serang, Curug, Curug)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	120.900.000	120.900.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

211010510	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terpeliharanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	UPTD Lab Ling (Kota Serang, Curug, Curug)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	121.500.000	121.500.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2110105	Administrasi Umum Perangkat Daerah											102.430.000	70.560.000	(31.870.000)			CDLHK LT
211010510	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK LT (Kab Lebak)	100.00 %	100.00 %	1 bulan	1 bulan	85 Nilai	85 Nilai	2.100.000	2.100.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
211010510	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK LT (Kab Lebak)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	15.476.000	15.476.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
211010510	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK LT (Kab Lebak)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	56.094.000	29.094.000	(27.000.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
211010510	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	tersedianya barang cetak dan penggandaan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK LT (Kab Lebak)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	9.060.000	9.060.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
211010510	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK LT (Kab Lebak)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	4.700.000	4.700.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
211010510	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK LT (Kab Lebak)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	15.000.000	10.130.000	(4.870.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lainnya	

21101.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												5.000.000	250	(4.999.750)			CDLHK LT
21101.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK LT (Kab Lebak)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	0 Unit	85 Nilai	85 Nilai		5.000.000	250	(4.999.750)	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	Pengadaan 1 unit Laptop disediakan (dalam aplikasi SIPD tidak menyimpan anggaran nol maka diisikan pagu 250 sebagai pagu pengandaan yg tidak akan diserap)	
21101.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												194.600.000	221.600.000	27.000.000			CDLHK LT
21101.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	tersedianya fasilitas jasa komunikasi air dan listrik	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK LT (Kab Lebak)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai		39.600.000	39.600.000	-	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)		
21101.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK LT (Kab Lebak)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai		155.000.000	182.000.000	27.000.000	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	Untuk Biaya Sewa Gedung/ Kantor CDLHK Lebak Tangerang	
21101.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												66.900.000	66.900.000	-			CDLHK LT
21101.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK LT (Kab Lebak)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai		51.000.000	51.000.000	-	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)		
21101.09.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK LT (Kab Lebak)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai		15.900.000	15.900.000	-	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)		
21101.09	Administrasi Umum Perangkat Daerah												125.040.000	135.840.000	10.800.000			CDLHK PSC
21101.09.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK PSC (Kota Serang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai		8.040.000	13.040.000	5.000.000	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	Belanja ATK	

211010604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK PSC (Kota Serang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	69.600.000	69.600.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
211010605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	tersedianya barang cetak dan penggandaan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK PSC (Kota Serang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	24.100.000	34.100.000	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	cetak dan penggandaan	
211010606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK PSC (Kota Serang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	8.300.000	8.300.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
211010608	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK PSC (Kota Serang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	15.000.000	10.800.000	(4.200.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan	
2110107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											40.000.000	9.000.000	(31.000.000)			CDLHK PSC
211010706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK PSC (Kota Serang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	40.000.000	9.000.000	(31.000.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengadaan Personal Computer ditiadakan	
2110108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											47.000.000	29.084.180	(17.915.820)			CDLHK PSC
211010802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK PSC (Kota Serang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	47.000.000	29.084.180	(17.915.820)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengurangan berasal dari biaya listrik, hasil perhitungan pembiayaan biaya listrik per bulan kurang lebih 2 juta, sehingga anggaran tersedia diperkirakan mencukupi utk 12 bulan	
2110108	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											61.960.000	86.960.000	25.000.000			CDLHK PSC
211010802	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK PSC (Kota Serang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	43.960.000	68.960.000	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pajak Kendaraan dan Pemeliharaan Kendaraan R4 R2	

211010910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor CDLHK PSC (Kota Serang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	18.000.000	18.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
211010910	Administrasi Umum Perangkat Daerah											80.155.000	73.725.000	(6.430.000)			UPTD SPTH
211010910	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD SPTH (Kab. Serang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	1 Bulan	85 Nilai	85 Nilai	2.092.000	2.092.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
211010910	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD SPTH (Kab. Serang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	5 Bulan	85 Nilai	85 Nilai	20.240.000	20.240.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
211010910	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya makanan dan minuman	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD SPTH (Kab. Serang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 Bulan	85 Nilai	85 Nilai	31.675.000	31.675.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
211010910	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD SPTH (Kab. Serang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 Bulan	85 Nilai	85 Nilai	8.440.000	8.440.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
211010910	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD SPTH (Kab. Serang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 Bulan	85 Nilai	85 Nilai	2.708.000	2.708.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
211010910	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD SPTH (Kab. Serang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	7 Bulan	85 Nilai	85 Nilai	15.000.000	8.570.000	(6.430.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Berkurang 6.430.000 krn Refocussing. Direfocussing 6.340.000 hrsnya 6.430.000 pengganti satuan 90.000 dari listrik penyediaan jasa penunjang	

21101.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah												22.500.000	24.500.000	2.000.000			UPTD SPTH
21101.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD SPTH (Kab. Serang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	4 Bulan	85 Nilai	85 Nilai		22.500.000	24.500.000	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bertambah Rp. 2jt dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang (listrik) ,untuk Pembelian Face Print/Mesin Absensi	
21101.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												125.060.000	113.166.000	(11.894.000)			UPTD SPTH
21101.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	tersedianya fasilitas jasa komunikasi air dan listrik	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD SPTH (Kab. Serang)	100.00 %	100.00 %	12 Bulan	10 Bulan	85 Nilai	85 Nilai		56.400.000	49.186.000	(7.214.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengurangan Biaya Listrik	
21101.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD SPTH (Kab. Serang)	100.00 %	100.00 %	12 Bulan, 34 orang	12 Bulan, 34 orang	85 Nilai	85 Nilai		68.660.000	63.980.000	(4.680.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
21101.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												81.640.000	88.024.000	6.384.000			UPTD SPTH
21101.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD SPTH (Kab. Serang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	8 Bulan	85 Nilai	85 Nilai		48.140.000	48.140.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	sudah dapat diakomodir	
21101.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala gedung gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD SPTH (Kab. Serang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 Bulan	85 Nilai	85 Nilai		33.500.000	39.884.000	6.384.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bertambah dari penyediaan jasa penunjang lembur security, untuk Perbaikan Bagian Depan Atap Gedung Kantor, green house,dll	
21101.10	Administrasi Umum Perangkat Daerah												101.840.000	100.000.000	(1.840.000)			UPTD Tahura
21101.10.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	100.00 %	100.00 %	1 bulan	2 Bulan	85 Nilai	85 Nilai		1.001.000	1.001.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

21010602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	4 Bulan	85 Nilai	85 Nilai	14.919.000	14.919.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	sudah dapat diakomodir	
21010604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya makanan dan minuman	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 Bulan	85 Nilai	85 Nilai	61.960.000	67.020.000	5.060.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Untuk Extra fooding pamdal, OB, pramubakti dan adminitrasi	
21010605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 Bulan	85 Nilai	85 Nilai	6.540.000	6.540.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
21010606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 Bulan	85 Nilai	85 Nilai	2.420.000	2.420.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
21010608	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	11 Bulan	85 Nilai	85 Nilai	15.000.000	8.100.000	(6.900.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas	
210107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											60.000.000	60.000.000	-			UPTD Tahura
21010710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	60.000.000	60.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
210108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											28.800.000	28.800.000	-			UPTD Tahura
21010802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	28.800.000	28.800.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

2.11.01.03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											137.700.000	132.640.000	(5.060.000)			UPTD Tahura
2.11.01.03.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	100.00 %	100.00 %	1 paket	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	56.028.600	56.028.600	-	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)		
2.11.01.03.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kantor UPTD Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	100.00 %	100.00 %	12 bulan	12 bulan	85 Nilai	85 Nilai	81.671.400	76.611.400	(5.060.000)	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)		
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											1.730.000.000	1.223.383.390	(506.616.610)			
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup											1.000.000.000	769.049.890	(230.950.110)			Bidang Pengelolaan Sampah, Limbag B3 & Pengendalian Pencemaran
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)	1. Terlaksananya pemantauan kualitas air laut 2. Terlaksananya pemantauan kualitas udara ambien sesuai baku mutu udara ambien	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	8 Kab/Kota	17,60%	17,60%	3 Dok	2 dok	51,83 Nilai	51,83 Nilai	350.000.000	249.700.000	(100.300.000)	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	anggaran hasil refocusing	
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)	Terlaksananya Pembinaan Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai pedoman Tersusunnya Laporan pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah sesuai pedoman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kota Serang, Kota Tangerang	17,60%	17,60%	2 dok	2 dok	51,83 Nilai	51,83 Nilai	650.000.000	519.349.890	(130.650.110)	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	anggaran hasil refocusing	
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup											80.000.000	32.050.000	(47.950.000)			Bidang Pengelolaan Sampah, Limbag B3 & Pengendalian Pencemaran
2.11.03.1.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)	terlaksananya upaya isolasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kota Serang	17,60%	17,60%	1 dok	1 dok	51,83 Nilai	51,83 Nilai	30.000.000	12.750.000	(17.250.000)	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	anggaran hasil refocusing	

211 03 1.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)	1. Tersusunnya dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan tatalaksana pengendalian pencemaran air	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kota Serang	17,60%	17,60%	2 Dok	1 dok	51,83 Nilai	51,83 Nilai	50.000.000	19.300.000	(30.700.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
211 03 1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup											100.000.000	53.940.000	(46.060.000)			Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran
211 03 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)	terlaksananya Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah, Pemanfaatan Limbah B3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Prov. Banten	17,60%	17,60%	1 dok	1 dok	51,83 Nilai	51,83 Nilai	50.000.000	23.130.000	(26.870.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggaran hasil refocusing	
211 03 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)	Terlaksananya Pembinaan pengendalian pencemaran dan kerusakan terhadap pelaku usaha kegiatan sesuai tata laksana pengendalian pencemaran	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kota Serang	17,60%	17,60%	1 dok	1 dok	51,83 Nilai	51,83 Nilai	50.000.000	30.810.000	(19.190.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggaran hasil refocusing	
211 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup											300.000.000	166.471.500	(133.528.500)			UPTD Lab
211 03 1.03 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)	Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Prov. Banten	17,60%	17,60%	1 dok	183 Sampel dan 1 Dokumen	51,83 Nilai	51,83 Nilai	300.000.000	166.471.500	(133.528.500)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggaran hasil refocusing	
211 03 1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup											250.000.000	201.872.000	(48.128.000)			UPTD Lab
211 03 1.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)	1. Meningkatnya Kompetensi Laboratorium DLHK Melalui Uji Profisiensi 2. Meningkatnya Kompetensi Personil Laboratorium Melalui Pelatihan Parameter Air Laut 3. Terlaksananya Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 4. Terlaksananya Permohonan Reakreditasi Laboratorium DLHK	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kota Serang	17,60%	17,60%	1 dok	1) 25 Parameter 2) 5 Parameter 3) 1 Dokumen 4) 1 Parameter	51,83 Nilai	51,83 Nilai	250.000.000	201.872.000	(48.128.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggaran hasil refocusing (Penyesuaian Indikator pada aplikasi SIPD)	

211 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											70.000.000	50.701.200	(19.298.800)			
211 04 1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi											70.000.000	50.701.200	(19.298.800)			Bidang Pengelolaan Sampah, Limbag B3 & Pengendalian Pencemaran
211 04 1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indek Kualitas Udara (IKU)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab Pandeglang Kab Serang	68,8 Nilai	68,8 Nilai	1 dok	1 dok	51,83 Nilai	51,83 Nilai	35.000.000	25.350.600	(9.649.400)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggaran hasil refocusing	
211 04 1.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indek Kualitas Udara (IKU)	terlaksananya pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan Kehati	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab Pandeglang Kab Serang	68,8 Nilai	68,8 Nilai	1 dok	1 dok	51,83 Nilai	51,83 Nilai	35.000.000	25.350.600	(9.649.400)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggaran hasil refocusing	
211 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)											750.000.000	574.615.000	(175.385.000)			
211 05 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi											750.000.000	574.615.000	(175.385.000)			Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
211 05 1.01.01	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	Terlaksananya Pembinaan tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan sesuai kompetensi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	8 Kab Kota di prov banten	98%	98%	8 dok	9 dok	51,83 Nilai	51,83 Nilai	400.000.000	424.125.000	24.125.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kajian daya dukung dan daya tampung air Prov Banten (1 dok)	
211 05 1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	Terlaksananya pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup yang kompeten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	8 Kab Kota di prov banten	98%	98%	1 dok	1 dok	51,83 Nilai	51,83 Nilai	30.000.000	21.980.000	(8.020.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
211 05 1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	Terlaksananya Pemantauan implementasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Provinsi Banten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	8 Kab Kota di prov banten	98%	98%	1 dok	1 dok	51,83 Nilai	51,83 Nilai	270.000.000	108.680.000	(161.320.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	

21051004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi sesuai dengan SOP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	8 Kab Kota di prov banten	98%	98%	1 dok	1 dok	51,83 Nilai	51,83 Nilai	50.000.000	19.830.000	(30.170.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
2105	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											480.000.000	450.320.000	(29.680.000)			
2105100	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi											480.000.000	450.320.000	(29.680.000)			Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
21051000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian kepada lembaga/masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	8 Kab/Kota di Prov Banten dan Masyarakat Hukum Adat Lokasi di Kab Lebak Cibarani dan Citorek Kab. Lebak	76 klpk/lembaga	76 klpk/lembaga	25 Lembaga	35 Lembaga	51,83 Nilai	51,83 Nilai	480.000.000	450.320.000	(29.680.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengurangan Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain Penambahan (hutan adat Citorek 1 kelompok (bibit hjahe, Porang dan HOK)	
2111	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											1.120.000.000	1.069.450.500	(50.549.500)			
2111100	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional											1.120.000.000	1.069.450.500	(50.549.500)			Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran
21111000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Indeks Kualitas Air (IKA)	tersusunya dokumen penetapan kebijakan dan strategis provinsi dalam pengelolaan sampah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	8 Kab Kota di prov banten	53 (nilai)	53 (nilai)	1 Dokumen	1 Dokumen	51,83 Nilai	51,83 Nilai	60.000.000	53.374.000	(6.626.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
211110000	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Indeks Kualitas Air (IKA)	tersusunya MOU kerjasama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	8 Kab Kota di prov banten	53 (nilai)	53 (nilai)	1 Dokumen	1 Dokumen	51,83 Nilai	51,83 Nilai	1.060.000.000	1.016.076.500	(43.923.500)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	

3	Urusan Pemerintahan Pilihan																
3. 28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan											12.890.325.260,00	13.792.766.440,00	902.441.180			
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN											10.411.091.900	10.533.079.330	121.987.430			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung											400.000.000	410.951.280	10.951.280			Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	1. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	Tersusunnya datadan informasi sumberdaya hutan produksi diwilayah Provinsi Banten	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Kota Serang	10%	10%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	150.000.000	137.840.000	(12.160.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengutangan refocusing dan Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	1. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	Tersusunnya data dan informasi sumberdaya hutan Lindung diwilayah Provinsi Banten	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Kota Serang	10%	10%	1 Dokumen	3 Dokumen	32.71 %	32.71 %	50.000.000	177.100.000	127.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Data Informasi Hutan Lindung 1 dok, Pembuatan siteplan blok pemanfaatan mataram Tahura (95jt) 1 dok, Penyusunan data statistik kehutanan (55jt), 1dok	
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	1. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	Terlaksananya pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan hutan untuk kegiatan non kehutanan dikawasan hutan produksi	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Kota Serang	10%	10%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	50.000.000	39.881.280	(10.118.720)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengutangan refocusing dan Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	1. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	Terlaksananya pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan hutan untuk kegiatan non kehutanan dikawasan hutan lindung	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Kota Serang	10%	10%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	50.000.000	5.300.000	(44.700.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengutangan refocusing dan Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	1. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	Terlaksananya penilaian rencana pengelolaan kawasan hutan produksi	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Kota Serang	10%	10%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	50.000.000	22.420.000	(27.580.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengutangan refocusing dan Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	

3 28 03 1.03 07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	1. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	Terlaksananya penilaian rencana pengelolaan kawasan hutan Lindung	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Kota Serang	10%	10%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	50.000.000	28.410.000	(21.590.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengutangan refocusing dan Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)											400.000.000	544.993.000	144.993.000			Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
3 28 03 1.05 03	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	1. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	Pengolahan hasil budidaya bambu	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kabupaten Lebak	10%	10%	1 Komoditas	1 Komoditas	32.71 %	32.71 %	50.000.000	36.720.000	(13.280.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengutangan refocusing dan Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
3 28 03 1.05 02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi rekomendasi IUIPHHBK sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang	10%	10%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	25.000.000	19.275.000	(5.725.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penambahan ganti transport peserta sosialisasi, Pengurangan Penggandaan dan Penjualan	
3 28 03 1.05 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	Pengembangan budidaya jamur tiram, lebah madu, Aren dan tanaman dibawah tegakan	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang	10%	10%	4 Komoditas	4 Komoditas	32.71 %	32.71 %	300.000.000	469.544.000	169.544.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Porang , Lebah madu penambahan (Budidaya aren 4 kelompok) dan Jamur tiram 8 kelompok) wilayah Aren 2 klpk sobang, cihara 2 klpk, jamur tiram 4 klpk lebak , pandeglang 4)	
3 28 03 1.05 04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Non Kayu sesuai SOP	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang	10%	10%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	25.000.000	19.454.000	(5.546.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
3 28 03 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun											200.000.000	243.990.000	43.990.000			Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
3 28 03 1.07 03	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	Tersusunnya dokumen rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBB) secara manual dan online serta dokumen rencana pengolahan hasil hutan	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	8 Kab Kota di prov banten	10%	10%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	75.000.000	62.220.000	(12.780.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengutangan refocusing dan Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	

3 28 03 1.07 02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	Terlaksananya bimbingan teknis Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	8 Kab Kota di prov banten	10%	10%	1 kegiatan	1 kegiatan	32.71 %	32.71 %	50.000.000	140.020.000	90.020.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemberdayaan FMU (5 fmu Bantuan Bibit sengan dan Pupuk Organik padat) lokasi kab lebak	
3 28 03 1.07 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi rekomendasi IUIPHHK sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	8 Kab Kota di prov banten	10%	10%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	75.000.000	41.750.000	(33.250.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengutangan refocusing dan Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara											6.450.900.100	6.450.900.100	-			CDLHK LT
3 28 03 1.04 01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	2. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang	tersusunya dokumen rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan (RTn-RHL) dan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan (RPRHL)	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Lebak dan Kab Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan)	2.500 Ha	2.500 Ha	1 Dok	1 Dok	32.71 %	32.71 %	50.000.000	50.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	2. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang	Terbangunnya Hutan rakyat diluar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi Banten	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Lebak (Kec. Cihara, Cigemblong, Sajira, Curugbitung)	2.500 Ha	2.500 Ha	2500 Ha	175 Ha	32.71 %	32.71 %	890.610.000	890.610.000	-	DAK Fisik - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Penugasan - Kehutanan		
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Lebak (Kec. Cijaku, Cikurur) Kab Tangerang (kec Pakuhaji)	2.500 Ha	2.500 Ha	400 batang	400 batang	32.71 %	32.71 %	300.000.000	300.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
3 28 03 1.04 05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	2. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Penerapan teknik konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Lebak (Kec. Cihara, Cigemblong, Sajira, Curugbitung) Kota Tangerang (Kec. Ciledug, Tangerang, Karawaci)	2.500 Ha	2.500 Ha	720 UNIT	720 UNIT	32.71 %	32.71 %	5.011.520.100	5.011.520.100	-	DAK Fisik - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Penugasan - Kehutanan		
3 28 03 1.04 07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang	Terbangunnya unit percontohan pengembangan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan diwilayah provinsi banten	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Lebak (Kec. Cileles ds cipadang)	2.500 Ha	2.500 Ha	1 Unit	1 Unit	32.71 %	32.71 %	173.770.000	173.770.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

3.28.03.1.04.06	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang	terlaksananya pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan di wilayah provinsi banten	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Lebak dan Kota Tangerang	2.500 Ha	2.500 Ha	1 Dok	1 Dok	32.71 %	32.71 %	25.000.000	25.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara											2.230.191.800	2.220.191.800	(10.000.000)			CDLHK PSC
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	3. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon	tersusunya dokumen rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan (RTn-RHL) dan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan (RPRHL)	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Pandeglang dan Kab Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	2.500 Ha	2.500 Ha	1 dok	1 dok	32.71 %	32.71 %	50.000.000	50.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	3. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon	Terbangunnya Hutan rakyat diluar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi Banten	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Pandeglang (Kec Sobang, Kaduhejo) Kab Serang (Kec Krmatwatu, Tanara)	2.500 Ha	2.500 Ha	2500 Ha	125 Ha	32.71 %	32.71 %	1.376.279.000	1.118.745.000	(257.534.000)	DAK Fisik - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Penugasan - Kehutanan		
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon	Terlaksananya pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara .	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kel. Juhut Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang (Jauling), Ds. Kemuning Kec. Tunjungteja, Desa Sukacai kecamatan Baros Kab. Serang, Ds. Kadubeuang Kec. Mekarjaya, Ds. Waringinjaya Kec. Cigeulis kab. Pandeglangg (KBD)	2.500 Ha	2.500 Ha	350 batang	Jauling : 800 Btg, KBD : 4 Unit (160.000btg)	32.71 %	32.71 %	87.500.000	335.034.000	247.534.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penambahan untuk pembelian bibit penghijauan lingkungan	
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	3. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon	Terlaksananya Penerapan teknik konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (pembangunan Gully Plug di wilayah CDLHK-PSC)	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Pandeglang (Kec Sobang, Kaduhejo)	2.500 Ha	2.500 Ha	48 Unit	48 Unit	32.71 %	32.71 %	641.412.800	591.412.800	(50.000.000)	DAK Fisik - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Penugasan - Kehutanan	pagu refocusing yg bersumber dari APBD	
3.28.03.1.04.07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	3. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon	Terlaksananya pengembangan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Pandeglang (Kec Karangtanjung cadasari)	2.500 Ha	2.500 Ha	1 Unit	2 Unit	32.71 %	32.71 %	50.000.000	100.000.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	untuk penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Rehabilitasi jawara Hutan (SIRAJA HUTAN)	

3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3. Luas Lahan kritis yang terhabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon	terlaksananya pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan di wilayah Pandeglang Serang Cilegon	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Pandeglang dan Kab Serang,	2.500 Ha	2.500 Ha	1 Dok	1 Dok	32.71 %	32.71 %	25.000.000	25.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara											440.000.000	498.846.250	58.846.250			UPTD SPTH
3 28 03 1.04 05	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	4. Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat	Tersedianya bibit tanaman hutan dan MPTS sesuai standar	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Gn Pinang, Kab Serang	180.000 btg	180.000 btg	180.000 batang	181.750 batang	32.71 %	32.71 %	440.000.000	498.846.250	58.846.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bibit MPTS (1.750 btg (mangga dan durian))	
3 28 03 1.05	Perbenihan Tanaman Hutan											290.000.000	163.206.900	(126.793.100)			UPTD SPTH
3 28 03 1.05 01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	4. Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat	ditetapkannya pengadaan, pengedar benih/bibit tanaman hutan sesuai SOP	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Gn Pinang, Kab Serang	180.000 btg	180.000 btg	1 dok	1 dok	32.71 %	32.71 %	58.000.000	23.165.600	(34.834.400)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
3 28 03 1.05 02	Sertifikasi Sumber Benih	4. Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat	Terlaksananya Sertifikasi sumber Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Gn Pinang, Kab Serang	180.000 btg	180.000 btg	1 dok	1 dok	32.71 %	32.71 %	58.000.000	25.702.000	(32.298.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
3 28 03 1.05 03	Sertifikasi Mutu Benih	4. Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat	Terlaksananya Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Gn Pinang, Kab Serang	180.000 btg	180.000 btg	1 dok	1 dok	32.71 %	32.71 %	58.000.000	23.722.000	(34.278.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
3 28 03 1.05 04	Sertifikasi Mutu Bibit	4. Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat	Terlaksananya Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Kehutanan sesuai SOP	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Gn Pinang, Kab Serang	180.000 btg	180.000 btg	1 dok	1 dok	32.71 %	32.71 %	58.000.000	48.218.000	(9.782.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
3 28 03 1.05 05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	4. Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat	Terlaksananya pengawasan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Gn Pinang, Kab Serang	180.000 btg	180.000 btg	1 dok	1 dok	32.71 %	32.71 %	58.000.000	42.399.300	(15.600.700)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA											1.579.233.360	1.672.819.610	93.586.250			
3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam											300.000.000	476.733.500	176.733.500			Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE

3.28.04.1.03.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Tersedianya Dokumen Kajian Ekosistem Karst di Provinsi Banten	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Lebak (Kec Bayah, Cibeber, Ciligrang dan Sobang)	3 klpk	3 klpk	1 dok	1 dok	32.71 %	32.71 %	50.000.000	49.887.500	(112.500)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengurangan dari Refocusing Anggaran	
3.28.04.1.03.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon.	Tersusunnya Pemanfaatana Ekosistem lahan basah	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Pandeglang (Cikedal, Babakanlor)	3 klpk	3 klpk	2 dok	1 dok	32.71 %	32.71 %	50.000.000	30.156.000	(19.844.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengurangan dari Refocusing Anggaran	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon.	Terlaksananya pengelolaan Daerah Penyangga dikawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab. Pandeglang, Sumur Tamanjaya; Kab. Pandeglang, Cimanggu, Mangkualam; Kab. Pandeglang, Carita, Sukanegara; Kab. Pandeglang, Carita Cinoyong; Kab. Serang, Gunung Sari.	3 klpk	3 klpk	2 dok	2 dok	32.71 %	32.71 %	200.000.000	396.690.000	196.690.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penambahan Pengadaan Bibit Jenis Buah-buahan di Kabupaten Pandeglang, Pengadaan Bibit Kapolaga di Kabupaten Pandeglang, Pengadaan Bibit Kapolaga di Kabupaten Serang, HOK dan Perjalanan Dinas	
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah											40.000.000	28.980.000	(11.020.000)			CDLHK LT
3.28.04.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	terlaksananya pengawasan dan pengendalian peredaran, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi sesuai dengan sop	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Lebak dan Tangerang raya			1 Dok	1 Dok	32.71 %	32.71 %	40.000.000	28.980.000	(11.020.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam											120.000.000	62.757.500	(57.242.500)			CDLHK LT
3.28.04.1.03.02	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan pemeliharaan ekosistem Karst	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Lebak dan Tangerang raya	3 klpk	3 klpk	1 Dok	1 Dok	32.71 %	32.71 %	30.000.000	14.210.000	(15.790.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	

3 28 04 1.03 04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Lebak dan Tangerang raya	3 klpk	3 klpk	1 Dok	1 Dok	32.71 %	32.71 %	30.000.000	13.505.000	(16.495.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
3 28 04 1.03 05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Lebak dan Tangerang raya	3 klpk	3 klpk	1 Dok	1 Dok	32.71 %	32.71 %	60.000.000	35.042.500	(24.957.500)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain	
3 28 04 1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi											40.000.000	15.550.000	(24.450.000)			CDLHK PSC
3 28 04 1.02 01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon.	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan / atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab. Pandeglang, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	3 klpk	3 klpk	1 Dok	1 Dok	32.71 %	32.71 %	40.000.000	15.550.000	(24.450.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam											120.000.000	31.714.000	(88.286.000)			CDLHK PSC
3 28 04 1.03 02	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon.	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan pemeliharaan ekosistem Karst	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab. Pandeglang, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	3 klpk	3 klpk	1 Dok	1 Dok	32.71 %	32.71 %	30.000.000	10.150.000	(19.850.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain dan Anggran Refocusing	
3 28 04 1.03 04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon.	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab. Pandeglang, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	3 klpk	3 klpk	1 Dok	1 Dok	32.71 %	32.71 %	30.000.000	6.400.000	(23.600.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain dan Anggran Refocusing	
3 28 04 1.03 05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon.	Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab. Pandeglang, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	3 klpk	3 klpk	1 Dok	1 Dok	32.71 %	32.71 %	60.000.000	15.164.000	(44.836.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain dan Anggran Refocusing	

3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi											959.233.360	1.057.084.610	97.851.250			UPTD Tahura
3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	3. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	12,5%	12,5%	1 Dok	1 Dok	32.71 %	32.71 %	84.188.000	84.188.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
3.28.04.1.01.02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	3. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	Terlaksananya Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	12,5%	12,5%	1595.9 Ha	1595.9 Ha	32.71 %	32.71 %	125.160.000	124.200.000	(960.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain dan Anggran Refocusing	
3.28.04.1.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	3. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	Terlaksananya Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	12,5%	12,5%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	10.000.000	10.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
3.28.04.1.01.04	Pengawetan Koridor Hidupan Liar	3. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	Terlaksananya pengawetan Koridor Hidupan liar sesuai target	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	12,5%	12,5%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	10.000.000	9.800.000	(200.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain dan Anggran Refocusing	
3.28.04.1.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	3. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	Terlaksananya Pemulihan ekosistem TAHURA Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	12,5%	12,5%	12.5 Ha	12.5 Ha	32.71 %	32.71 %	72.800.000	72.800.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
3.28.04.1.01.06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	3. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	Terlaksananya Pemanfaatan jasa lingkungan TAHURA Provinsi	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	12,5%	12,5%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	25.000.000	21.992.000	(3.008.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain dan Anggran Refocusing	
3.28.04.1.01.07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	3. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	terlaksananya Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	12,5%	12,5%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	25.000.000	15.500.000	(9.500.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	nggran Refocusing	
3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	3. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan TAHURA dan peningkatan peran serta masyarakat sebagai mitra pengamanan kawasan TAHURA	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	12,5%	12,5%	12.5 Ha	12.5 Ha	32.71 %	32.71 %	75.000.000	285.290.000	210.290.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemulihan ekonomi masyarakat sekitar kawasan tahura (Bibit MPTS, HOK) (Penanaman dibawah tegakan melibatkan 3 desa	

3 28 04.1.01 05	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	3. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	12,5%	12,5%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	81.540.000	148.146.250	66.606.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anggaran Refocusing	
3 28 04.1.01 10	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	3. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	Tersusunnya Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	12,5%	12,5%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	35.000.000	33.794.000	(1.206.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anggaran Refocusing	
3 28 04.1.01 11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	3. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	Tersusunnya Rncana Pengelolaan TAHURA	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Tahura (Carita Kab. Pandeglang)	12,5%	12,5%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	415.545.360	251.374.360	(164.171.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anggaran Refocusing	
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											500.000.000,00	837.860.500,00	337.860.500			
3 28 05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											500.000.000	837.860.500	337.860.500			Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE
3 28 05.1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Lebak, Pandeglang, Serang	10 Klpk	10 Klpk	2 Kelompok	2 Kelompok	32.71 %	32.71 %	100.000.000	82.616.000	(17.384.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain dan Anggran Refocusing	
3 28 05.1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Lebak, Pandeglang, Serang	10 Klpk	10 Klpk	60 kelompok	60 kelompok	32.71 %	32.71 %	100.000.000	87.320.250	(12.679.750)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain dan Anggran Refocusing	
3 28 05.1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	Terlaksananya Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Lebak, Pandeglang, Serang	10 Klpk	10 Klpk	2 Kelompok	7 Kelompok	32.71 %	32.71 %	300.000.000	667.924.250	367.924.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perhutanan sosial wilayah lebak, pandeglang (bibit mpts dan HOK)	

3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)											400.000.000,00	749.007.000,00	349.007.000			
3 28 06 1 00	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											400.000.000	749.007.000	349.007.000			Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE
3 28 06 1 00 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	Tersusunnya penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang	20%	20%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	75.000.000	75.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
3 28 06 1 00 02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	terlaksananya optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kabupaten Lebak	20%	20%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	150.000.000	348.500.000	198.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penanaman pohon Penanaman pohon dalam rangka pemulihan lahan rawan longsor	
3 28 06 1 00 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	Terlaksananya Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kabupaten Serang, Cinangka, Rancasanggal	20%	20%	1 kegiatan	1 kegiatan	32.71 %	32.71 %	50.000.000	48.420.000	(1.580.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain dan Anggran Refocusing	
3 28 06 1 00 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Kab Serang kec Padarincang	20%	20%	1 kegiatan	1 kegiatan	32.71 %	32.71 %	75.000.000	261.175.000	186.175.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemulihan ekonomi masyarakat sekitar das berupa bibit produktif dan HOK	
3 28 06 1 00 05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	Terlaksananya Pembinaan Forum DAS	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	8 kabupaten kota di Prov Banten	20%	20%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	25.000.000	4.000.000	(21.000.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain dan Anggran Refocusing	
3 28 06 1 00 06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	8 kabupaten kota di Prov Banten	20%	20%	1 Dokumen	1 Dokumen	32.71 %	32.71 %	25.000.000	11.912.000	(13.088.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perjalanan Dinas, Makan Minum, ATK, Narasumber, Lain-lain dan Anggran Refocusing	
Jumlah												55.879.648.740,00	60.799.345.260,00	4.919.696.520,00			

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005 - 2025 dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan transparan serta akuntabel dalam rangka mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Rencana Kerja Perubahan ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD, Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten serta peran aktif stakeholder. Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 ini untuk dipedomani dan dilaksanakan.

